



INTEGRASI ANTAR-LEMBAGA DALAM PERCEPATAN PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI PERDESAAN

**KERJASAMA
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA**

dengan

**PUSAT STUDI EKONOMI KERAKYATAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

2018



INTEGRASI ANTAR-LEMBAGA DALAM PERCEPATAN PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI PERDESAAN

KERJA SAMA

**KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI
dengan
PUSAT STUDI EKONOMI KERAKYATAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

2018

Kajian Penyusunan Rekomendasi tentang

**INTEGRASI ANTARLEMBAGA
DALAM PERCEPATAN PENGEMBANGAN EKONOMI
KAWASAN PERDESAAN**

Edisi Pertama

Cetakan Pertama, September 2018

vi + 72 hlm., 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-602-309-387-8

Tim Kajian dan Penulis:

Dumairy

Catur Sugiyanto

Awan Santoso

Istianto Ari Wibowo

Puthut Indroyono

Rindu Sanubari Mashita Firdaus

Editor: Awan Santoso & Puthut Indroyono

Proofreader: Bernadetta Diana

Desainer cover: Aldo Pradipta

Diterbitkan oleh:

Indie Book Corner

Jl. Prayan I no. 80 B, Condongcatur,

Depok, Sleman, Jogja

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT sehingga kegiatan Kajian Penyusunan Rekomendasi Tentang Integrasi Antarlembaga Dalam Percepatan Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan dapat terselesaikan dan disusun dalam laporan ini.

Kajian ini diselenggarakan atas kerja sama antara Direktorat Pengembangan Kawasan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta untuk mendorong terciptanya integrasi dan kolaborasi antarlembaga di Kawasan Prioritas Pembangunan Nasional (KPPN), khususnya di Kawasan Perdesaan Agrowisata Menoreh Terpadu. Kajian dilakukan dengan melibatkan segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait di Kecamatan Samigaluh dan Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo melalui serangkaian *indepth-interview*, FGD, dan *workshop*.

Tim Kajian mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu kelancaran kajian ini. Semoga kajian ini dapat dimanfaatkan dalam usaha untuk mempercepat pengembangan ekonomi kawasan perdesaan di Indonesia secara umum, dan khususnya di Kawasan Perdesaan Agrowisata Menoreh Terpadu Kabupaten Kulon Progo.

Yogyakarta, 7 September 2018

Tim Kajian dan Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I - PENDAHULUAN	
Latar Belakang	1
Tujuan	3
Manfaat	3
Metode Kajian	4
<i>Pendekatan</i>	4
<i>Tahapan Kajian</i>	4
<i>Analisis Data</i>	5
BAB II - KERANGKA TEORI	
Pengantar	6
Integrasi Ekonomi Kerakyatan	7
BAB III - GAMBARAN UMUM KAWASAN	
Letak Strategis Kawasan	16
Penduduk dan Mata Pencaharian	18
Potensi Ekowisata Kawasan	19
Kelembagaan di Kawasan	22
Isu-isu Strategis Kawasan	24
BAB IV - PEMBAHASAN	
Pengantar	28
Kelembagaan dan Pola Kerja Saat Ini	29
Kolaborasi melalui BUMDES Bersama	36
Miniatur Model Integrasi Antarlembaga	38
Berbagai Alternatif Model Integrasi Antarlembaga di KAMT	39
Pelajaran dari Pujon dan Nglanggeran	44
BAB V - KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
Kesimpulan	48
Rekomendasi	50
REFERENSI	52
LAMPIRAN-LAMPIRAN	54

DAFTAR TABEL

Tabel III.1. Luas Wilayah di Kawasan Perdesaan Agrowisata Menoreh Terpadu	17
Tabel III.2. Jumlah Penduduk di Kawasan Perdesaan Agrowisata Menoreh Terpadu	19
Tabel III.3. Produk Unggulan Desa	19
Tabel III.4. Potensi Wisata Kawasan Agrowisata Menoreh Terpadu	20
Tabel III.5. Potensi Kelembagaan Masyarakat	23

DAFTAR TABEL

Gambar II.1. Model Inkubator Ekonomi Kerakyatan	7
Gambar II.2. Model Pemerintahan Kolaboratif (<i>Collaborative Governance</i>)	12
Gambar II.3. Susunan Multilevel Pemerintahan Kolaboratif (<i>Collaborative Governance</i>) di Area Lindung Nasional Hin Nam No di Vietnam	13
Gambar III.1. Peta Kabupaten Kulonpro	16
Gambar III.2. Model Hipotetik Integrasi AntarLembaga di Kawasan Agrowisata Menoreh	27
Gambar IV.1. Model Integrasi Kemitraan Swasta dan Masyarakat	38
Gambar IV.2. Model Integrasi Berbasis Sistem Ekonomi Kerakyatan	40
Gambar IV.3. Forum Kolaborasi	42
Gambar IV.4. Model Integrasi Bisnis Sosial	43
Gambar IV.5. Integrasi Digital-Spasial	43

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berbagai upaya telah ditempuh pemerintah untuk merealisasikan desentralisasi pembangunan sesuai amanat UU Desa. Komitmen untuk mendorong desentralisasi fiskal ditunjukkan pemerintah melalui realisasi Dana Desa yang meningkat pesat dari sebesar Rp20,76 triliun pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp60 triliun pada tahun 2018. Dalam kurun waktu 3,5 tahun, pemerintah telah membangun 123.858 km jalan desa, 791.250 m jembatan, 6.576 pasar desa, 1.971 embung, 31.122 sumur, 28.380 unit irigasi, 38.217 km drainase, 18.177 PAUD, 5.402 Polindes, 11.574 Posyandu, 38.311 unit air bersih, 112.003 unit MCK, dan 3.111 unit raga desa¹.

Bukan sekadar alokasi dana dan infrastruktur desa, pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) juga telah mengupayakan berbagai terobosan pembangunan sosial ekonomi desa. Pemerintah telah menjalankan 4 program prioritas, yaitu Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades), BUMDes, embung, dan sarana olahraga desa. Dalam rangka mengawal agenda pembangunan desa tersebut, pemerintah

1 <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3606172/pemerintah-kurcurkan-dana-desa-sejak-2015-apa-saja-hasilnya>; diunduh ulang tanggal 1 November 2018, jam 13:10

sudah membentuk Satgas Dana Desa dan forum Perguruan Tinggi Desa (Pertides).

Banyak yang telah dicapai dari berbagai terobosan pembangunan desa tersebut, termasuk kontribusinya dalam penurunan jumlah penduduk miskin dari bulan Maret 2017 sebanyak 27,77 juta jiwa turun menjadi 26,58 juta jiwa pada bulan September 2017². Namun, penanggulangan kemiskinan di perdesaan masih menjadi tantangan serius bagi pemerintah. Hal ini karena tingkat kemiskinan di perdesaan masih sebesar 13,47% (16,31 juta jiwa), jauh lebih tinggi dari di perkotaan sebesar 7,26% (10,27 juta jiwa). Tantangan lainnya adalah ketimpangan dalam penguasaan sumber daya produksi, tata kelola, pasar, dan sumber daya manusia perdesaan.

Kemiskinan dan ketimpangan yang masih cukup lebar di tengah masifnya pembangunan di perdesaan oleh berbagai lembaga, baik Pemerintah Pusat, Daerah, Desa, maupun sektor swasta, masyarakat, dan Perguruan Tinggi menjadi tantangan serius ke depan. Situasi ini menunjukkan integrasi dan kolaborasi antarlembaga terkait pengembangan kawasan perdesaan yang masih lemah dan perlu ditingkatkan. Hal ini karena integrasi dan kolaborasi adalah salah satu esensi mendasar desentralisasi dan demokratisasi pembangunan desa.

Tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) telah menjadi modal utama bagi keberhasilan beberapa desa di Indonesia. Model kolaborasi tersebut telah menumbuhkan prakarsa dan kerjasama dari para pemangku kepentingan di kawasan. Hal ini antara lain terlihat dari kasus di Desa Wango, Sumba Timur, Desa Ponggok, Klaten, Desa Pujon Kidul, Malang, dan desa-desa lain yang mampu memanfaatkan segenap potensi SDA dan SDM dalam jalinan kolaborasi antar-pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian untuk menyusun rekomendasi bagaimana integrasi antarlembaga dalam percepatan pengembangan kawasan perdesaan di Indonesia ke depan.

2 <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/07/16/berkurang-633-ribu-penduduk-miskin-indonesia-catat-rekor-terendah-sejak-1998>; diunduh tanggal 1 November 2018, jam 13:10

Tujuan

- Kajian ini bertujuan untuk:
- Memetakan lembaga-lembaga yang terkait pengembangan kawasan perdesaan beserta pola-pola integrasi dan kolaborasi yang pernah dilakukan.
- Menemukan pelajaran berharga (*lesson learned*) dan faktor sukses (*success factors*) model integrasi dan kolaborasi antarlembaga yang berhasil dalam mengembangkan perdesaan, beserta berbagai kendala dan jalan keluarnya.
- Menemukenali praktik dan menyusun model *Collaborative Governance* serta mengambil pelajaran berharga berikut penyesuaian-nya dalam konteks kawasan perdesaan di Indonesia.
- Mengkaji model integrasi dan kolaborasi antarlembaga melalui sistem dan teknologi informasi perdesaan, baik yang *existing* maupun rancang bangun *prototype* kolaborasi ke depan.
- Menyusun rekomendasi integrasi antarlembaga dalam percepatan pengembangan kawasan perdesaan di Indonesia.

Manfaat

- Kajian ini diyakini akan bermanfaat sebagai:
- Bahan rujukan bagi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dalam mendorong integrasi antarlembaga dalam percepatan pengembangan kawasan perdesaan.
- Bahan acuan bagi Pemerintah Desa dalam membangun desanya berbasis *collaborative governance* dengan melibatkan peran serta aktif para pihak di kawasan perdesaan.
- Panduan kolaborasi bagi lembaga-lembaga terkait seperti lembaga masyarakat, swasta, dan perguruan tinggi dalam percepatan pengembangan kawasan perdesaan di Indonesia.

Metode Kajian

Pendekatan

Kajian ini menggunakan pendekatan **kaji-tindak partisipatif**, di mana kajian ditujukan untuk memecahkan masalah kurang terintegrasinya lembaga-lembaga atau institusi yang seharusnya berfungsi dapat menjalankan agenda percepatan pengembangan kawasan perdesaan. Kaji tindak ini melibatkan peran serta aktif para pihak, pemangku kepentingan, dan lembaga terkait dalam tahapan-tahapan kajian sampai dengan penyusunan rekomendasi pemecahan masalah tersebut. Sebagai bagian penting dari kaji tindak partisipatif, maka kajian ini menggunakan metode **studi kasus**, dengan melihat lokasi-lokasi yang tingkat kolaborasi/integrasi antarlembaga baik sehingga dapat dijadikan *role model* (*benchmark*).

Tahapan Kajian

Tahap-tahap dalam kajian penyusunan rekomendasi integrasi antarlembaga dalam percepatan pengembangan kawasan perdesaan ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- **Studi literatur** dan **studi data sekunder**: dilakukan melalui penelusuran pustaka yang memuat konsepsi/teori *collaborative governance* dan integrasi, serta dokumen-dokumen yang menjadi dasar integrasi/kolaborasi antar-lembaga dalam percepatan pengembangan kawasan perdesaan.
- **Studi kasus** dan **studi benchmarking**: dilakukan di desa-desa atau kawasan yang terdapat pola integrasi/kolaborasi pengembangan kawasan perdesaan, serta desa yang dianggap berhasil dalam mendorong integrasi/kolaborasi. Desa lokasi *benchmarking* di antaranya adalah desa di Kabupaten Malang, Desa Ponggok, Kabupaten Klaten, dan Kawasan Desapolitan di Desa Jomboran, Desa Krakitan, dan Desa Jimbung, Kabupaten Klaten. Sementara studi kasus dilakukan di desa-desa yang masuk Kawasan Perdesaan Strategis Nasional, yaitu di Kawasan Agrowisata Bukit Menoreh Kabupaten Kulon Progo, DIY. Studi kasus dilakukan

melalui wawancara mendalam (*depth interview*), pemetaan partisipatif, *Focus Group Discussion* (FGD), dan *workshop*. Studi juga mendalami bagaimana pemanfaatan sistem dan teknologi informasi dalam mendorong integrasi dan kolaborasi antarlembaga di desa-desa tersebut. *Output* studi kasus dan *benchmarking* berupa model integrasi dan kolaborasi antar-lembaga dalam percepatan pengembangan kawasan perdesaan.

- ***Workshop multipihak*** dan ***workshop para ahli***; dilakukan untuk mendiskusikan hasil-hasil studi literatur, studi kasus, dan studi *benchmarking* di lapangan yang sudah diformulasikan dalam sebuah model untuk validasi dan mendapat masukan perbaikan. Pendapat ahli dan masukan para pihak akan menjadi bahan perbaikan model dan penyusunan rekomendasi akhir. *Workshop* dilakukan di Yogyakarta.

Analisis Data

Kerangka model dan analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah teori ***collaborative governance*** yang meliputi 3 dimensi dan variabel, yaitu *principle engagement* (penemuan, pengertian, deliberasi, dan determinasi), *shared motivation* (pemahaman bersama, komitmen yang dibagi, kepercayaan, dan legitimasi internal), dan *capacity for joint action* (penyusunan prosedur dan kelembagaan, kepemimpinan, pengetahuan, dan sumber daya). Analisis data dilakukan secara deskriptif menggunakan analisis sosio-antropologis, lingkungan strategis, statistik-deskriptif, kelembagaan. Secara khusus kajian ini juga menggunakan analisis sistem informasi dalam mengkaji model integrasi dan kolaborasi berbasis sistem dan teknologi informasi.

BAB II

KERANGKA TEORI

Pengantar

Desa hingga saat ini masih menjadi tempat yang menggambarkan kompleksitas masalah yang terkait dengan sosial, politik, dan ekonomi di negeri ini. Desa menjadi tempat yang identik dengan masyarakat yang miskin dan tidak berdaya. Hal tersebut merupakan kontradiksi yang sangat ironis karena pada dasarnya desa adalah kawasan yang sangat kaya dengan berbagai sumber daya produktif terutama yang telah disediakan oleh alam. Akan tetapi sering kali kekayaan tersebut sangat sulit diakses oleh masyarakat terdekat dengan sumber daya tersebut berada. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat dijauhkan dari proses pengambilan keputusan tentang pengelolaan berbagai sumber daya produktif yang ada.

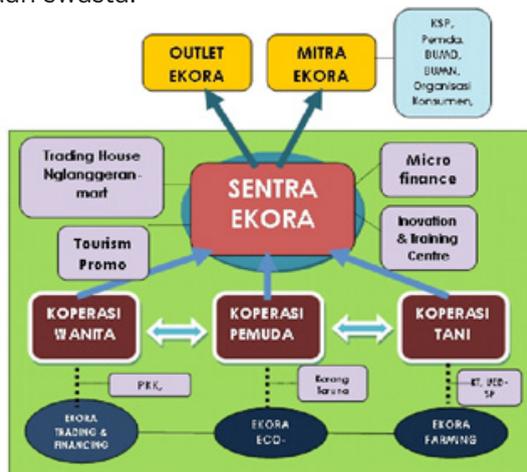
Masyarakat menjadi pihak yang terpaksa menerima kebijakan yang bersifat sepihak dan pada akhirnya masyarakat menjadi kelompok yang akses terhadap sumber daya produktif menjadi sangat tergantung pada pihak-pihak yang lebih kuat, yaitu pemerintah dan swasta. Sifat pengelolaan pemerintahan tersebut membuat hubungan sosial, ekonomi, dan politik yang timpang di berbagai lapisan baik antar lembaga pemerintah dan antarpemangku kepentingan yang salah satunya adalah masyarakat.

Ketidakberdayaan masyarakat dalam hal keterbatasan akses terhadap sumber daya produktif dan ketergantungan terhadap pihak-

pihak yang lebih berkuasa, memunculkan upaya model demokratisasi sumber daya melalui inkubator ekonomi kerakyatan yang mengacu pada amanat negara yang tercantum dalam pasal 33, UUD 1945. Model inkubator tersebut menempatkan kolektivitas di tingkat masyarakat untuk menguasai dan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada di sekitar wilayah mereka secara demokratis dan pemerintah ataupun swasta menjadi mitra yang memiliki posisi setara dengan masyarakat.

Integrasi Ekonomi Kerakyatan

Pada tahun 2009, Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan menyusun sebuah model inkubator ekonomi kerakyatan yang didasarkan pada penelitian tentang desa miskin di wilayah Gunung Kidul, Provinsi Yogyakarta. Model inkubator ini menggunakan dasar demokratisasi dalam segala aspek yaitu akses dan penggunaan sumber daya produktif yang dimotori oleh kelembagaan masyarakat, terutama dalam bentuk koperasi yang dikuatkan dengan hubungan kemitraan dengan pemerintah dan swasta.



Gambar II.1. Model Inkubator Ekonomi Kerakyatan³

³ Awang, San Afri, (dkk), 2013, *Pengembangan Model Inkubator Ekonomi Kerakyatan di Desa-desa Miskin Sekitar Hutan: Studi Kasus di Kabupaten Gunung Kidul, DIY, Yogyakarta*: Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan, Universitas Gadjah Mada

Model inkubator ini menyediakan saran bagaimana seharusnya masyarakat diintegrasikan dengan sesamanya untuk mengumpulkan kekuatan kolektif dalam menguasai sumber daya produktif. Setelah mengalami masa uji coba pelaksanaan model, terbukti bahwa kemajuan desa dapat dicapai dan dipercepat dengan adanya kelembagaan masyarakat untuk mengelola desanya terutama pengelolaan untuk sumber daya strategis dan produktif. Akan tetapi, model ini masih memiliki kekurangan yaitu belum adanya rancangan proses dan model integrasi antara pemerintah dan para pemangku kepentingan termasuk masyarakat dalam sebuah bangunan formal pemerintahan atau proses pengambilan keputusan.

Kebutuhan akan adanya rancangan integrasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan dalam model pemerintahan didorong oleh kenyataan bahwa segala upaya yang bersifat sentralistis dan *top-down* yang telah diuji coba puluhan tahun ternyata tidak bisa membantu mengurai berbagai kompleksitas di desa terutama hal-hal yang berkaitan dengan hubungan antarlembaga pemerintah dan antara pemerintah dengan masyarakat. Kegagalan tersebut mendorong makin kuatnya upaya demokratisasi dan integrasi antara pemerintah dengan para pemangku kebijakan di kawasan desa. Salah satu bentuk pengelolaan pemerintahan atau proses pengambilan kebijakan yang saat ini semakin populer adalah *collaborative governance* (pemerintahan kolaboratif). Model pemerintahan ini bersifat demokratis dan dapat memberikan jaminan lebih besar akan kedudukan masyarakat, terutama ketika kekuatan kelembagaan atau kolektif masyarakat sudah terbentuk.

Terdapat beberapa pengertian dari pemerintahan kolaboratif, antara lain:⁴

- Pemerintahan yang menempatkan berbagai pemangku kepentingan terkait dalam forum bersama untuk menyusun kebijakan yang berorientasi pada konsensus.

4 Ansell, Chris dan Alison Gash, 2007, *Collaborative Governance in Theory and Practice*, dalam *Journal of Public Administration Research and Theory*, Oxford University Press, diunduh dari <https://academic.oup.com/jpart/article-abstract/18/4/543/1090370>, pada 05 Juli 2018

- Susunan pemerintahan di mana pihak non-pemerintah memiliki kedudukan formal dalam proses pengambilan keputusan untuk kebijakan yang bersifat publik.
- Pihak publik dan swasta bekerja sama dalam kerja kolektif dalam kedudukannya masing-masing untuk menyusun kebijakan publik.
- Tuntutan proses pengambilan keputusan secara kolektif yang dikendalikan oleh sekelompok individu yang tergabung dalam beberapa organisasi.

Bentuk pemerintahan ini dapat terwujud jika suatu wilayah dapat menanggulangi beberapa tantangan yang ada. Ada 3 kondisi utama yang pada umumnya terjadi sebelum adanya pemerintahan kolektif dan proses inisiasi harus berangkat dari upaya untuk keluar dari kondisi tersebut.

- Ketimpangan Kuasa dan Pengetahuan (*Power-Resource-Knowledge Asymetris*). Keadaan ketika para pemangku kepentingan/masyarakat tidak memiliki kekuatan, modal, dan pengetahuan apa pun untuk benar-benar terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Keberadaan mereka dalam sistem pada dasarnya hanya seremonial dan bersifat pasif dalam menerima kebijakan yang sudah disusun, walaupun pada kenyataannya mereka adalah pihak yang paling terpengaruh oleh kebijakan tersebut.
- Jejak Kerja Sama dan Konflik Masa Lalu (*Pre-history of Cooperation and Conflict*). Jenis relasi yang terjadi antara pemerintah dan pemangku kepentingan tentu menjadi pengaruh paling besar dalam menentukan relasi masa kini dan masa yang akan datang karena memengaruhi besar kecilnya kepercayaan yang dibutuhkan dalam pemerintahan kolaboratif.
- Timbal Balik dan Kendala dalam Partisipasi (*Incentives for and Constrains on Participation*). Jika partisipasi pemangku kepentingan di luar pemerintah merupakan dasar utama dalam demokrasi dan pemerintahan kolaboratif, maka pemangku kepentingan memerlukan adanya sebuah kepastian atau garansi bahwa

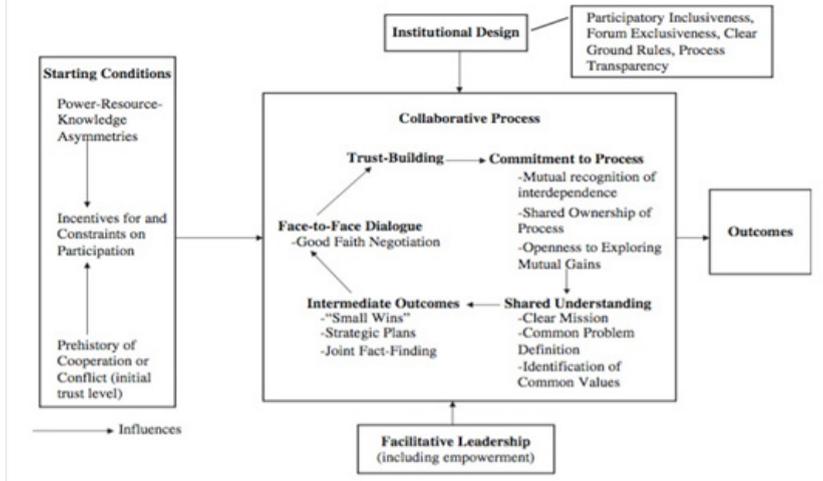
mereka memiliki kedudukan yang nyata dalam susunan pemerintahan. Masyarakat tidak akan berinisiatif untuk terlibat dalam partisipasi nyata jika mengetahui bahwa posisi mereka hanya sekadar pemberi saran dan seremonial.

Ketiga tantangan tersebut atau kondisi yang pada umumnya terjadi di sebuah wilayah sebelum terlaksananya pemerintah kolaboratif dapat diupayakan untuk diatasi melalui dua alat utama yang berperan sebagai amunisi dalam pelaksanaan proses kolaboratif yaitu peta jalan inisiasi pemerintahan kolaboratif. Dua alat utama dalam inisiasi pemerintahan kolaboratif antara lain:

- Kepemimpinan Fasilitatif (*Facilitative Leadership*). Kepemimpinan ini memiliki beberapa tugas kewajiban, yaitu mempromosikan serta memastikan terjadinya partisipasi yang luas dan aktif. Kepemimpinan ini juga diharuskan memiliki prioritas dalam upaya untuk memajukan/memberdayakan kelompok dan atau pemangku kepentingan yang lebih lemah di suatu wilayah. Pihak-pihak yang terlibat dalam lingkaran kepemimpinan harus yang berasal dari kalangan profesional, jujur, dan diutamakan merupakan tokoh organik (yang muncul dari kalangan masyarakat itu sendiri).
- Rancangan Kelembagaan (*Institutional Design*). Rancangan kelembagaan harus bersifat inklusif dan transparan. Rancangan ini merupakan protokol dasar dalam proses kolaborasi yang memberikan gambaran jelas akan posisi sah masing-masing pihak yang akan terlibat di dalam pemerintahan kolaboratif terutama posisi pemangku kepentingan yang berasal dari pihak di luar pemerintahan. Pemangku kepentingan akan memiliki inisiatif dan alasan untuk berkomitmen dalam proses kolaborasi jika mereka mengetahui legalitas posisi mereka dalam sebuah sistem.

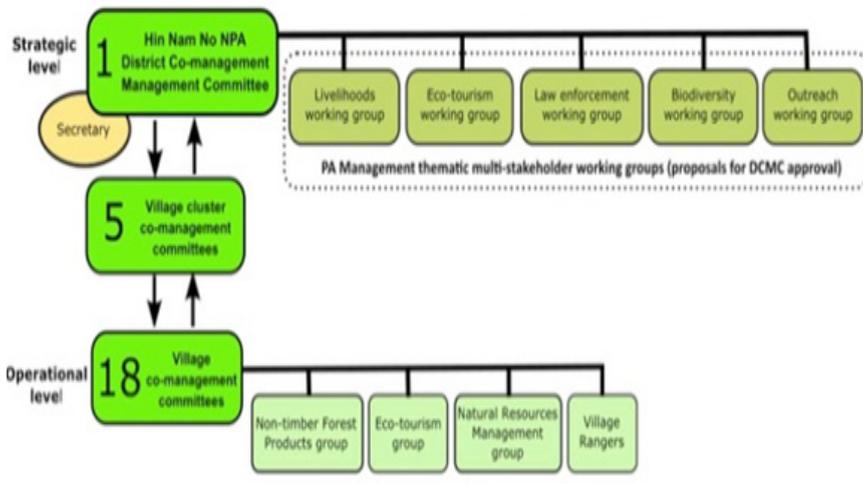
Kedua alat tersebut bertugas untuk memfasilitasi proses-proses inisiasi pemerintahan kolaboratif, antara lain:

- Dialog Langsung Personal (*Face to face dialogue*). Tujuan utama dari proses ini adalah menghilangkan berbagai prasangka antarpihak yang sebelumnya telanjur tumbuh karena ketiadaan wadah komunikasi bersama. Proses ini juga berguna untuk mencari kepentingan bersama.
- Proses Pembangunan Rasa Percaya (*Trust Building Process*). Jika sebelumnya dalam suatu wilayah terdapat rekam jejak konflik antarpihak terutama antara pemerintah dan nonpemerintah, maka dalam proses inisiasi pemerintahan kolaboratif pihak-pihak tersebut harus mengalokasikan dana dan waktu untuk proses pengembalian rasa saling percaya.
- Komitmen terhadap Proses (*Commitment to the Process*). Para pemangku kepentingan akan berpartisipasi untuk mengamankan jaminan bahwa pandangan mereka tidak akan terpinggirkan serta mengamankan posisi mereka yang telah dilegitimasi. Bentuk pemerintahan kolaboratif menggeser wewenang penentu kebijakan dari pemerintah ke bentuk kolaborasi kolektif antara pemerintah dengan masyarakat. Akan tetapi, kolaborasi ini bisa terhambat jika ketimpangan relasi masih terjadi di antara pihak.
- Pengertian Bersama (*Shared Understanding*). Proses ini bertujuan untuk menyepakati pandangan bersama tentang permasalahan, potensi, nilai, visi, dan misi.
- Hasil Sementara (*Intermediate Outcome*). Pada akhirnya sampai pada proses evaluasi yang merujuk pada temuan bersama antara pemerintah dan masyarakat akan bentuk terbaik pemerintahan kolaboratif. Selanjutnya adalah menyusun rencana strategis pelaksanaan pemerintahan kolaboratif yang mengacu pada prinsip konsensus.



Gambar II.2. Model Pemerintahan Kolaboratif
(*Collaborative Governance*)⁵

Pemerintahan kolaboratif merupakan salah satu model yang diyakini dapat menaungi berbagai kepentingan di dalam suatu wilayah secara demokratis tanpa meninggalkan salah satu pihak yang meninggalkan pihak lainnya. Akan tetapi, model ini juga banyak diyakini sebagai model pemerintahan yang cukup utopis. Inisiasi pemerintahan kolaboratif yang seutuhnya bukan hal yang mudah namun bukan tidak mungkin. Pelaksanaan pemerintahan kolaboratif yang telah berhasil dilaksanakan dan masih berjalan hingga saat ini salah satunya yang ada di Area Lindung Nasional Hin Nam No di Vietnam yang merupakan satu-satunya wilayah dengan pola pemerintahan kolaboratif yang diakui secara resmi di Vietnam.



Gambar II.3. Susunan Multilevel Pemerintahan Kolaboratif (*Collaborative Governance*) di Area Lindung Nasional Hin Nam No di Vietnam ⁶

Model pemerintahan kolaboratif ini terdiri dari beberapa prinsip antara lain:

- Pemerintahan berdasarkan pendekatan partisipasi yang terbuka.
- Struktur pemerintahan yang memudah kolaborasi pihak multilevel.
- Penghargaan terhadap partisipasi kelompok masyarakat tradisional/adat terutama terkait zonasi wilayah.
- Penjanjian sah dan formal antara pemerintah dan pemangku kepentingan.
- Masyarakat lokal menjadi tokoh utama dalam pengelolaan pemerintahan wilayah.

⁶ Koning, Mirjam de, dkk, 2016, *Collaborative Governance Improves Management Effectiveness of Hin Nam No National Protected Area In Central Lao Pdr*, dalam *The International Journal of Protected Areas and Conservation Volume 22.2* November 2016, IUCN World Commission on Protected Areas (WCPA), diunduh dari http://parksjournal.com/wp-content/uploads/2016/11/PARKS-22.2-de-Koning-et-al-10.2305IUCN.CH_2016.PARKS-22-2MdK.en_.pdf , 06 Juli 2018

Model pemerintahan kolaboratif versi Area Lindung di Vietnam berhasil melaksanakan beberapa tujuan utama yaitu melindungi lingkungan yang tadinya sempit terancam serta proses integrasi masyarakat setempat terhadap proses perlindungan alam tanpa membuat masyarakatnya terlihat sebagai ancaman. Alokasi jumlah tim dan dana untuk pelaksanaan pemerintahan kolaboratif ini terbilang kecil akan tetapi keefektitan pengelolaan pengambilan keputusan justru terlihat dominan. Selain itu keberhasilan pola pemerintahan kolaboratif yang telah teruji efektif menyelesaikan tujuannya turut diapresiasi dengan adanya pengakuan sebagai situs warisan budaya alam oleh dunia. Hal ini menjadi pembuktian lebih luas akan manfaat model pemerintahan kolaboratif sekaligus meningkatkan legitimasi partisipasi semua kalangan.

BAB III

GAMBARAN UMUM KAWASAN

Salah satu kawasan yang oleh pemerintah (dih. Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Perdesaan, Kementerian Desa dan PDPT) dijadikan sebagai kawasan “Prioritas” berada di kabupaten Kulonprogo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara khusus kawasan itu berada di pegunungan Menoreh di wilayah Kulonprogo bagian utara, yang sejak tahun 2016 ditetapkan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo sebagai Kawasan Perdesaan Agrowisata Menoreh Terpadu (KPAMT), yang mencakup 6 (enam) desa di dua kecamatan berdasarkan SK Bupati No. 367/C/2016. Keenam desa itu adalah: dua desa, Gerbosari dan Sidoharjo di Kecamatan Samigaluh, dan empat desa, Banjarasri, Banjarharjo, Banjaroya, dan Banjararum di Kecamatan Kalibawang. Sebelum ditetapkan sebagai kawasan prioritas, kawasan tersebut sudah ditetapkan juga sebagai kawasan agropolitan, yang hanya meliputi kecamatan Kalibawang, dengan pusatnya di desa Banjararum. Pada tahun penetapan kawasan tersebut, Bupati juga menerbitkan SK tentang Tim Koordinasi Pengembangan Kawasan Perdesaan (SK TKPKP) No. 328/C/2016.

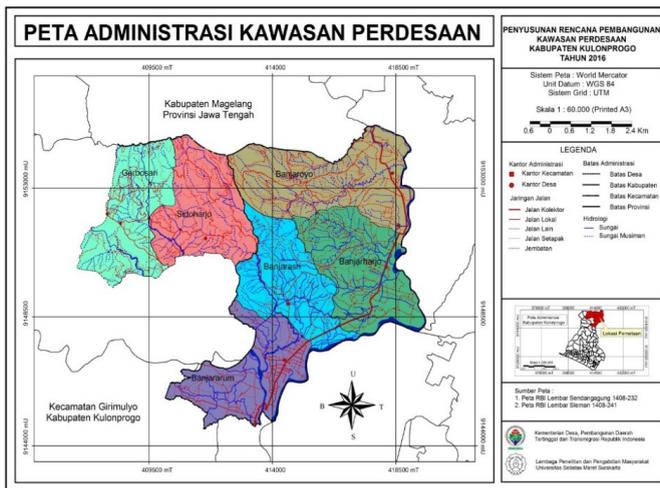
Dasar penentuan kawasan tersebut terutama merujuk pada potensi yang diunggulkan pada sektor pertanian dan pariwisata. Kawasan tersebut sejak lama memang dikenal sebagai kawasan perkebunan buah-buahan seperti durian menoreh, kakao, kopi, dan teh.

Sedangkan potensi pariwisata yang telah berkembang sebelumnya dan diunggulkan adalah wisata alam dan wisata budaya. Selain itu, penentuan kawasan “Agrowisata Bukit Menoreh” dilakukan melalui serangkaian diskusi terutama di lingkungan pemerintahan mulai dari Bappeda, sektor terkait, kantor kecamatan dan kantor desa. Berikut adalah gambaran umum terkini (*update*) tentang rancangan perkembangan kawasan yang ditetapkan sejak tahun 2016.

Letak Strategis Kawasan

Berdasarkan SK Bupati di atas, kawasan ini mencakup areal seluas 77,49 km² terdiri dari enam desa; masing-masing Banjarharjo seluas 12,34 km², Banjaroyo 16,82 km², Banjararum 16,82 km², Banjarasri 11,42 km², Gerbosari 10,77 km², dan Sidoharjo 13,75 km². Batas-batas kawasan meliputi di sebelah utara adalah Kabupaten Magelang Jawa Tengah, sebelah timur Kabupaten Magelang dan Kabupaten Sleman, sebelah selatan Kecamatan Girimulyo serta di sebelah barat dan barat laut adalah desa yang masih termasuk dalam wilayah Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulonprogo.

Gambar III.1. Peta Kabupaten Kulonprogo



Sumber: <http://rpkp.org/kab-kulon-progo/>

Letaknya berada di wilayah pegunungan wilayah utara Kabupaten Kulonprogo dengan rata-rata ketinggian masuk dalam kelompok 500-1000 meter di atas permukaan laut. Berada di ketinggian pegunungan menyebabkan tingkat kemiringan topografi wilayah di desa-desa tersebut tergolong tinggi, yakni antara 16°- 40°, bahkan ada dua desa yang memiliki tingkat kemiringan topografi lebih dari 40°, yakni di desa-desa di Kecamatan Samigaluh.

Tabel III.1. Luas Wilayah di Kawasan Perdesaan Agrowisata Menoreh Terpadu

Nama Desa	Luas Wilayah (km²)	Kecamatan
Banjarharjo	12,34	Kalibawang
Banjaroyo	16,82	
Banjarasri	11,42	
Banjararum	16,82	
Sidoarjo	13,75	Samigaluh
Gerbosari	10,77	
	77,49	

Sumber: <http://rpkp.org/kab-kulon-progo/>

Penetapan Kawasan Perdesaan Agrowisata Menoreh Terpadu di Kulonprogo, tidak bisa lepas dari letak kawasan tersebut dalam kerangka perencanaan nasional yang menetapkan Borobudur sebagai salah satu destinasi utama pariwisata nasional di satu pihak, dan pembangunan bandara internasional di Kecamatan Temon Kulonprogo. Dengan berpindahnya bandara internasional ke wilayah Kulonprogo, maka jalur wisata menuju ke Borobudur mau tidak mau harus melewati jalur di kawasan bagian utara di Samigaluh dan Kalibawang, yang letaknya berdekatan dengan candi Borobudur. Penetapan kawasan “Agrowisata Bukit Menoreh” nantinya diharapkan dapat menjadi “kawasan penyangga” destinasi wisata nasional tersebut.

Selain letaknya yang strategis yang berada dalam jalur destinasi wisata nasional di atas, dasar pemikiran yang dikembangkan dalam penetapan kawasan ini adalah pada upaya memadukan berbagai potensi aktual yang terdapat di kawasan perdesaan ini. Potensi sektor pertanian dan perkebunan yang berkembang di wilayah itu didorong untuk dapat dijadikan daya tarik bagi wisata, selain aspek nilai sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat.

Selain keindahan alam pegunungan, kawasan Menoreh juga memiliki potensi sumber air yang dibutuhkan oleh masyarakat. Beberapa kecamatan di pegunungan Menoreh termasuk di Samigaluh dan Kalibawang, juga menyimpan sumber mata air, yang saat ini telah dikelola sebagai sumber air minum oleh PDAM. Oleh Pemkab Kulonprogo, pemanfaatan banyaknya sumber air yang ada juga dikembangkan untuk air minum dalam kemasan. Dalam kerangka konservasi dan untuk pemenuhan kebutuhan irigasi pertanian, saat ini juga dikembangkan pembuatan embung, yang sekaligus dipergunakan untuk wisata alam.

Penduduk dan Mata Pencaharian

Penetapan kawasan Agrowisata Menoreh Terpadu tentu diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pengembangan kawasan penyangga tersebut. Oleh karenanya, peran masyarakat dalam berpartisipasi mendorong kawasan tersebut menjadi sangat penting.

Berdasarkan statistik tahun 2016, jumlah penduduk total di Kawasan Perdesaan Agrowisata Menoreh Terpadu sebanyak 19.313 jiwa yang tersebar di enam desa. Kepadatan tertinggi ada di Desa Banjararum yaitu 698 jiwa/km². Komposisi penduduk di Kawasan Perdesaan Agrowisata Menoreh Terpadu ini meliputi 17.744 jiwa laki-laki dan 18.802 jiwa perempuan. Dengan rasio jenis kelamin 95. Jumlah rumah tangga di Kawasan Perdesaan Agrowisata Menoreh Terpadu adalah 10.873 dengan jumlah terbanyak ada di Desa Banjararum yaitu sebanyak 2.576 rumah tangga.

Tabel III.2. Jumlah Penduduk di Kawasan Perdesaan
Agrowisata Menoreh Terpadu

Nama Desa	Jumlah Penduduk (jiwa)		Jumlah	Jumlah Rumah Tangga
	Laki-laki	Perempuan		
Banjarharjo	3.347	3.614	6.961	2.043
Banjaroyo	3.761	3.889	7.650	2.257
Banjarasri	2.082	2.237	4.319	1.354
Banjararum	4.161	4.542	8.703	2.596
Sidoarjo	2.371	2.428	4.799	1.399
Gerbosari	2.118	2.184	4.302	1.287

Sumber: <http://rpkp.org/kab-kulon-progo/>

Tabel III.3. Produk Unggulan Desa

Kecamatan	Desa	Potensi Perkebunan
Kalibawang	Banjarharjo	Kebun Kakao (10 ha), Kebun buah naga (0,4 Ha), Kebun buah campuran (2 Ha)
	Banjaroyo	Kebun Durian Tonegoro
	Banjarasri	Kebun buah naga, kebun durian
	Banjararum	Kebun kakao, Kebun kelapa, Kebun rambutan, kebun durian, kedelai
Samigaluh	Sidoharjo	Kebun kopi, Kakao, cengkeh, durian
	Gerbosari	Jagung, Cengkeh, Kakao, Tebu, Kopi, Teh, Bunga Krisan

Sumber: <http://rpkp.org/kab-kulon-progo/>

Potensi Ekowisata Kawasan

Kalibawang menjadi salah satu dari dua kecamatan pendukung Kawasan Agrowisata Menoreh Terpadu, yang semua desa di wilayahnya termasuk di dalamnya. Sementara di Kecamatan Samigaluh, hanya dua desa dari tujuh desa yang ikut dimasukkan dalam kerangka kawasan itu. Wawancara dengan Camat Kalibawang memberikan gambaran terkini tentang bagaimana perkembangan “proyek” KAMT.

Ia menyatakan bahwa KAMT telah dikembangkan sejak 2016 ketika dilakukan studi oleh Tim dari UNS, yang mencoba memetakan berbagai potensi sumber daya alam dengan melakukan *focus group discussion* menghadirkan *stakeholder* terkait di pemerintah kabupaten, kecamatan, hingga ke desa.

Tabel III.4. Potensi Wisata Kawasan Agrowisata Menoreh Terpadu

Kecamatan	Desa	Potensi Pariwisata
Kalibawang	Banjarharjo	Makam Nyi Ageng, Kebun Buah Naga Serang, Jembatan Gantung Duwet, Rafting Progo, Kuliner Mbok Sri (Iwak Kali)
	Banjaroyo	Makam Sentono, PDAM Embung Banjaroya, Gereja Promasan, Goa Maria Sendangsono, Goa Maria Welas Asih, Jati Kembar, Rest Area Bendo, Bendungan Ancol, Makam Kyai Krpyak II, Bendungan Vanderwijk, Wisma bendungan Vanderwijk, Persewaan Kendaraan, Park Area, Kios Oleh-Oleh, Wisata Waduk Tonegoro
	Banjarasri	Goa Maria Ratu Blencong, Monumen MBKD, Wisata Outbond Dolan Ndesa
	Banjararum	Aliran Sungai dan Panorama Gunung Goa, Gardu Pandang, Masjid Sultoni
Samigaluh	Sidoharjo	Curug Siluwok, Curug Sidoharjo, Curug Watu Jengger, Pemandangan Watu Tekek, Gunung Kendil, Wisata Air Tukmudal, Gunung Tugel, Gunung Tongangang, Wana Desa Lembah Ceples, Homestay, Jasa Persewaan Kendaraan, Gunung Kendil
	Gerbosari	Puncak Suroloyo, Sentra Bunga Krisan

Sumber: <http://rpkp.org/kab-kulon-progo/>

Embung “Toh Negoro” adalah salah satu embung yang diunggulkan sebagai tempat agrowisata yang ada di Desa Banjaroyo. Saat ini sudah terbangun dengan pembiayaan dari CSR Pertamina, berikut bantuan 3000 tanaman durian dan lengkeng. Tanaman duriannya belum banyak berbuah, demikian juga lengkengnya. Tanaman tersebut dikelola oleh kelompok tani. Selain itu di desa tersebut juga pernah ada “wana desa” (hutan desa), namun menurut camat setempat kurang berkembang.

Selain itu, potensi Desa Banjarasri juga telah ada bisnis berpola kolaborasi yakni “Dolan Ndeso”. Pengelolaan wisata ini dikembangkan oleh pengelola swasta berkolaborasi dengan kelompok-kelompok masyarakat (Pokdarwis, kelompok wanita, kelompok ternak, UMKM, dan lain-lain). Masyarakat melalui Pokdarwis didorong untuk berpartisipasi dalam mengembangkan makanan lokal yang diproduksi masyarakat. Area yang digunakan untuk wisata desa “Dolan Ndeso” berada di tanah kas desa.

Di Banjararum, potensi wisata desa yang dikembangkan berupa “gardu pandang” untuk melihat Candi Borobudur dari atas. Kawasan ini banyak monyetnya, yang kadang merusak tanam-tanaman. Di desa ini harapannya ke depan sebagaimana dirancang dalam RT/RW akan berkembang pasar pertanian.

Yang belum muncul dari wawancara sejauh ini adalah mengenai industri produk olahan yang dikembangkan oleh masyarakat. Meskipun demikian, ada beberapa usaha di masyarakat yang mulai membuat produk olahan, sehingga nilai tambah produk pertanian dapat meningkat dan menambah pendapatan.

Produk olahan yang dilakukan secara individual dan terbatas telah dilakukan dalam pengembangan “Cacao”, yang dikenal dengan “Cokelat Pegagan”, yang dikembangkan di Desa Banjarharjo oleh “Bu Martuti”. Ada pula kelompok tani wanita yang tengah mengembangkan produk olahan pegagan. Koneksitas antarkomoditas juga tengah dikembangkan, misalnya oleh kelompok tani yang mencoba mengaitkan produksi kebun kakao dengan ternak kambing PE. Potensi lain yang juga berkembang adalah *slondok*, makanan olahan dari ketela.

Beberapa masalah dalam mendorong integrasi sebagaimana dinyatakan Pak Camat, adalah dalam hal infrastruktur. Koneksi jalan antar destinasi wisata di desa-desa kawasan dianggapnya kurang memadai, misalnya jalan yang menghubungkan Kalibawang – Suroloyo, di Samigaluh, yang sangat sempit dan sulit untuk mobil berpapasan. Ia menyampaikan seringkali masyarakat kerja bakti untuk mengangkat kendaraan yang terperosok karena bersimpangan dengan kendaraan lain.

Koneksi yang menghubungkan Sendang Sono dan Embung Toh Negoro juga dinilai masih kurang memadai. Dalam hal akomodasi wisata, saat ini juga tengah dipikirkan bagaimana mengembangkan *home-stay*, bagi wisatawan, yang selain dapat menikmati suasana desa, dapat pula ikut belajar membikin *slondok*, *daden geni*. Paket wisata ini dikembangkan di Banjaroyo oleh Pokdarwis yang diketuai oleh M Asmadun, di bawah lurah desa Anton Supriyatno.

Kelembagaan di Kawasan

Salah satu tujuan kajian ini adalah memetakan lembaga-lembaga yang terkait pengembangan kawasan perdesaan beserta pola-pola integrasi dan kolaborasi yang pernah dilakukan. Beberapa pertanyaan yang dapat diajukan dalam rangka memetakan kelembangaan perlu dijabarkan pada lingkup pemerintah baik vertikal maupun horizontal dalam rangka melihat sejauh mana lembaga-lembaga tersebut berpartisipasi dalam mendorong tujuan pengembangan kawasan. Lebih jauh lagi, kajian ini juga perlu memetakan lembaga-lembaga yang berpotensi mendukung pencapaian tujuan pengembangan kawasan agar peran dan fungsinya dapat teridentifikasi sekaligus dapat dikembangkan dalam kerangka integrasi, baik berasal dari kebijakan di atas agar *nyambung* dengan “ *arus bawah*” yang berbasis pada partisipasi masyarakat (formal dan informal).

Tabel III.5. Potensi Kelembagaan Masyarakat

Desa	Kelembagaan Pariwisata	Kelembagaan Pertanian	Kelembagaan Peternakan
Banjarharjo	Pokdarwis (2)	Gapoktan, P3A	Kelompok ternak sapi (5), Kelompok ternak kambing (3)
Banjaroyo		Kelompok tani (43), KWT (3), Gapoktan Asri Lestari, Lumbung Amor II	
Banjararum	-	P3A (13 kel.), Gapoktan (1 kelompok), Kel. Tani (43) Pokdakan (4), Komunitas Krumpyung (1), Komunitas Traill (1)	Kel. sapi (Ngudi Rejo Klepu, Jati Manunggal, Rukun Mejing), Kel. ternak kambing (Maju Jaya Blumbung), Ternak ayam (Usaha Mulya Cemani), Kel. ikan (Agro Mina Semaken III, Mina Manunggal, Sentul; Mina Sejahtera, Kemesu; Mina Mandiri, Kisik)
Banjarasri	Pokdarwis “Dewi Asri” Pokdarwis “Dolan Ndeso”	Kel. tani (16 kelompok), P3A (6 Kelompok), Gapoktan (1),	Kelompok peternakan (16 kelompok) KUBE (1 kelompok)
Sidoharjo	Pokdarwis, Produsen kopi & pangan lokal, Kel. souvenir jam tangan kacamata kayu	Gapoktan, KWT, P3A, Lumbung Pangan, Pokmas IDT KUBE, Pamsimas	Kelompok Tani KUBE
Gerbosari	Pokdarwis “Suroloyo”, Gapoktan “Manunggal Desa Gerbosari”, Kelompok tani (19), Kelompok wanita tani (5), Kelompok P3A (23)	Kelompok Ternak “Menoreh Makmur”, Kelompok ternak kambing PE “Menoreh Maju” Kelompok Ternak Sapi “Tentrem” Pokdakan “Banyu Mili”	-

Isu-isu Strategis Kawasan

- **Revitalisasi Musyawarah Antar-Desa (MAD) dan Badan Kerjasama Antar-Desa (BKAD)**

MAD di Kawasan Agrowisata Bukit Menoreh memiliki struktur kepengurusan yang terdiri dari perwakilan masing-masing desa. Pertemuan MAD sesuai kebutuhan terkait kerja sama antar-desa, termasuk bagaimana pengembangan BKAD yang ada di dua Kecamatan dalam kawasan tersebut. Pertemuan terbatas dihadiri oleh pengurus, perangkat desa, dan perwakilan setiap desa 2 orang. Saat ini BKAD masih sebatas menangani Unit Pengelola Keuangan (UPK) sebagai kelanjutan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Ada wacana membuat BUMDes Bersama yang melibatkan usaha-usaha antardesa.

- **Formulasi pola relasi para pihak dalam tata kelola agrowisata yang berbasis masyarakat (*community based agrotourism*)**

Setiap desa dalam kawasan agrowisata memiliki pola tata kelola yang berbeda, sesuai karakteristik masing-masing desa tersebut. Kelompok tani dan pokdarwis bersama-sama mengelola Embung Tonogoro di Desa Banjaroya. Sementara destinasi wisata Dolan Ndeso di Desa Banjarasri dikelola oleh pihak swasta/investor, dengan melibatkan pokdawis setempat pada beberapa kegiatannya. Kelompok tani wanita di Desa Banjarharjo mendukung agrowisata melalui produk olahan kakao. Kelompok tani mengelola agrowisata bunga krisan di Desa Gerbosari. Ada rencana membuat BUMDes di beberapa usaha yang sebagian sudah dikelola masyarakat atau komunitas tersebut.

- **Pola integrasi antarlembaga kawasan agrowisata bukit Menoreh dengan kawasan wisata Borobudur**

Kawasan Agrowisata Bukit Menoreh yang berbatasan langsung dengan desa di Kabupaten Magelang diharapkan menjadi penyangga Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur. Namun sampai

saat ini belum ada pola integrasi antar kedua kawasan yang sudah melembaga. Inisiatif integrasi antar kedua desa perbatasan yang ada dalam bentuk pembangunan akses jalan ke lokasi wisata di kedua desa. Kolaborasi tersebut dilakukan oleh kelompok masyarakat pengelola wisata Embung Tonogoro Banjaroya dan Balai Ekonomi Desa (Balkondes) desa sebelah di Kabupaten Magelang.

- **Optimalisasi aset wisata dan rantai nilai komoditas unggulan dalam satu kawasan**

Kawasan Agrowisata Bukit Menoreh memiliki berbagai aset wisata baru yang berpotensi tumbuh berkembang karena didukung posisinya sebagai sentra penghasil durian di wilayah DIY. Penanaman durian semakin masif seiring pembukaan *spot* wisata baru di dalam kawasan. Penelusuran dan pemanfaatan rantai nilai durian, dari produk primer, pascaolahan, maupun sampai ke penjualan akhir berpotensi memunculkan kolaborasi dan integrasi antardesa dan lembaga-lembaganya di dalam satu kawasan agrowisata. Demikian halnya dengan rantai nilai komoditas unggulan lain di kawasan agrowisata seperti halnya kakao.

- **“Pabrik pengetahuan” sebagai jejaring sekaligus penyedia SDM agrowisata yang andal**

Pengembangan kapasitas pengelola agrowisata menjadi kebutuhan setiap desa di kawasan. Untuk itu diperlukan adanya “pabrik pengetahuan” melalui pendidikan dan pelatihan yang sistematis dan berkelanjutan, yang sekaligus menjadi perekat kolaborasi kelembagaan. Dalam rangka itu, di kawasan agrowisata terdapat Badan Penyuluh Pertanian (BPP) yang selama ini berfungsi sebagai “pabrik pengetahuan” penopang kapasitas teknik produksi agrowisata kawasan. Perlu ditelusuri peluang kolaborasi BPP dengan lembaga pengembangan SDM lainnya di kawasan agrowisata tersebut. Kapasitas SDM agrowisata masih perlu diperluas sampai dengan pengolahan pascapanen, pengelolaan agrowisata, teknologi informasi, pemasaran kreatif, dan kecakapan lainnya yang diperlukan.

- **Harmonisasi program dan peraturan pemerintah yang masuk ke kawasan perdesaan**

Kawasan Agrowisata Menoreh telah menjadi lokasi program dari berbagai lintas instansi dan lembaga baik pusat maupun daerah. Demikian halnya terdapat berbagai peraturan baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun daerah yang menjadikan kawasan tersebut sebagai *locus*-nya. Belum lagi peraturan di tingkat desa yang dibuat pascaimplementasi UU Desa. Berbagai program dan peraturan tersebut memerlukan harmonisasi agar selaras dengan tujuan integrasi antarlembaga di kawasan agrowisata tersebut. Bukan sebaliknya membuat disharmoni karena adanya saling tumpang tindih (*overlapping*) dan *miss*-koordinasi.

- **Potensi budaya dan kearifan lokal masyarakat kawasan Menoreh**

Kawasan Agrowisata Menoreh berada di tengah-tengah sistem sosial budaya masyarakat perdesaan yang bercorak komunal dan sarat dengan ritual, tradisi, dan kearifan lokal. Komunalitas dalam budaya selama ini menjadi perekat kebersamaan di antara masyarakat desa dalam kawasan. Ritual budaya dan tradisi masyarakat menjadi pijakan sekaligus bagian penting dalam pengembangan agrowisata di kawasan Menoreh. Penelurusan lebih dalam lagi perihal berbagai ritual budaya dan tradisi masyarakat tersebut menjadi potensi bagi integrasi antarmasyarakat sekaligus antardesa dan lembaga di kawasan.

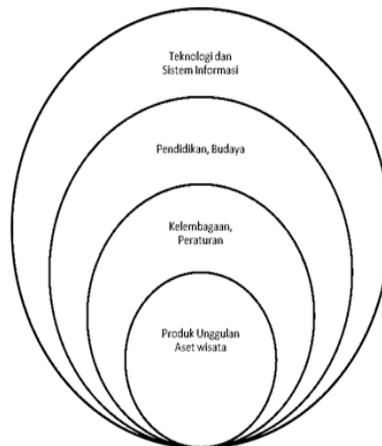
- **Program Bedah Menoreh untuk membuka akses jalan calon Bandara NYIA dan Wisata Candi Borobudur**

Pemerintah Pusat dan Daerah di DIY sedang menyiapkan pembangunan bandara internasional baru di wilayah Pantai Glagah, Kecamatan Temon, Kulon Progo. Pada saat yang sama Pemerintah mengerjakan program Bedah Menoreh dengan membuka akses jalan ke kawasan wisata di bukit Menoreh, sekaligus menghubungkan antara bandara NYIA tersebut ke wisata Candi Borobudur di Provinsi

Jawa Tengah, di mana Bedah Menoreh tersebut melintasi desa-desa Kawasan Agrowisata Menoreh. Pembukaan akses jalan yang diikuti dengan berbagai peluang destinasi wisata baru dan pengembangan produknya diharapkan mendorong intensnya integrasi dan kolaborasi antarlembaga dan desa di Kawasan Agrowisata Menoreh tersebut.

- **Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi sebagai jaringan digital kawasan**

Kawasan Menoreh sudah memiliki aksesibilitas yang cukup baik terhadap jaringan internet. Beberapa pengelola destinasi wisata juga sudah memanfaatkan *platform* digital baik web maupun media sosial sebagai sarana komunikasi dan pemasaran aset wisata dan produk unggulan mereka. Dalam skala tertentu pemanfaatan teknologi dan sistem informasi ini telah mendorong integrasi antardesa, antarlembaga, dan antarmasyarakat dalam satu Kawasan Agrowisata Menoreh. Ke depan akan berpeluang lebih besar lagi menjadi jembatan integrasi baik internal kawasan maupun kawasan dengan dunia luar. Berdasar isu-isu strategis kawasan agrowisata Menoreh yang diuraikan di atas maka dapat digambarkan Model Hipotetis Integrasi Antarlembaga di Kawasan Perdesaan sebagai berikut:



Gambar III.2. Model Hipotetik Integrasi AntarLembaga di Kawasan Agrowisata Menoreh

BAB IV

PEMBAHASAN

Pengantar

Tujuan kajian ini adalah: 1) Memetakan lembaga-lembaga yang terkait pengembangan kawasan perdesaan beserta pola-pola integrasi dan kolaborasi yang pernah dilakukan; 2) Menemukan pelajaran berharga (*lesson learned*) dan faktor sukses (*success factors*) model integrasi dan kolaborasi antar-lembaga yang berhasil dalam mengembangkan kawasan perdesaan, beserta berbagai kendala dan jalan keluarnya; 3) Menemukenali praktik model *Collaborative Governance* dan penyesuaiannya dalam konteks kawasan perdesaan di Indonesia; 4) Mengkaji model integrasi dan kolaborasi antar-lembaga melalui sistem dan teknologi informasi perdesaan, baik yang *existing* maupun rancang bangun *prototype* kolaborasi ke depan; 5) Menyusun rekomendasi integrasi antarlembaga dalam percepatan pengembangan kawasan perdesaan di Indonesia.

Berdasarkan tujuan tersebut, bab ini membahas temuan lapangan yang terkait dengan pengembangan integrasi antarlembaga (*collaborative governance*). Dari hasil-hasil FGD dan wawancara mendalam diperoleh temuan lapangan yang memberikan gambaran kondisi praktik dan relasi antar kelembagaan sosial ekonomi dalam masyarakat 6 desa di Kawasan Agrowisata Menoreh Terpadu. Melalui deskripsi ini diharapkan dapat diperoleh gambaran perilaku dan relasi usaha antarlembaga yang tengah berlangsung (*existing condition*), pemahaman

dan komitmen bersama para pihak dan potensi kerja sama atau kolaborasi yang dimungkinkan agar dicapai bentuk integrasi yang positif dalam meningkatkan pembangunan.

Pada bagian akhir bab ini akan diformulasikan alternatif model-model bagaimana integrasi bisa terbentuk, faktor apa saja yang dapat membentuk, dan jika sudah terbentuk, apakah sudah ada peta jalan (*roadmap*) untuk prasyarat bagi pengembangan integrasi dalam praktik riil selanjutnya termasuk dalam memasukkan elemen-elemen masyarakat dalam posisi strategis maupun praktik riil. Pertanyaan lebih lanjut adalah menjawab optimalisasi kemanfaatan aset agrowisata termasuk komoditasnya dalam bentuk alur yang saling menyambung. Hal penting lainnya adalah penggalian kearifan lokal yaitu tradisi-tradisi yang dapat menyatukan masyarakat dan pemerintah kawasan untuk mendorong model integrasi, termasuk peran teknologi informasi dapat membuat jarak bukan halangan.

Kelembagaan dan Pola Kerja Saat Ini

Dalam serangkaian FGD, para peserta yang hadir selain dari kalangan pemerintah kecamatan dan desa, wakil-wakil kelompok masyarakat juga hadir Pokdarwis, Poktan, dan kelompok masyarakat lainnya. FGD dilakukan sebanyak tiga kali, yang pertama di Kalibawang dengan peserta *stakeholders* dari kecamatan itu, dilanjutkan yang kedua di Samigaluh. Yang ketiga dilakukan dengan menggabungkan *stakeholders* desa di dua kecamatan ditambah dengan dinas-dinas terkait di Kabupaten Kulonprogo.

Secara sepintas para peserta di dua FGD pertama dan kedua mengungkapkan bahwa di 2 kecamatan kawasan ini kondisi pertaniannya sudah cukup maju, meskipun ada pula masalah yang mereka hadapi, terutama komoditas kakao, durian, dan sayur mayur di Kalibawang, sedangkan di Samigaluh telah berkembang perkebunan rakyat dengan komoditas kopi, teh, dan cengkeh. Kelompok-kelompok berdasarkan komoditas juga telah ada, seperti kelompok tani, kelompok wanita, kelompok ternak, ikan, dan lain-lain. Pada

umumnya, kelompok-kelompok tersebut adalah bentukan dari program pemerintah sejak dulu. Bahkan di Samigaluh masih tercatat dalam dokumen RPKP yakni kelompok IDT, yang telah berdiri sejak awal tahun 1990-an. Kelompok-kelompok tani maupun gabungan kelompok tani pada umumnya juga diketahui telah berdiri sejak era 80-an (lihat tabel 5 di bab III).

Demikian pula kelompok-kelompok yang terkait dengan pariwisata, seperti Pokdarwis juga telah ada terutama di wilayah yang saat ini tengah dikembangkan obyek wisata seperti di Embung Tonegoro (Desa Banjaroyo). Selain itu juga ada destinasi atau tujuan wisata lainnya yang sudah lama terkenal untuk wisata religi adalah Sendangsono. Meskipun ada yang telah lama berdiri, ada juga Pokdarwis yang baru dibentuk seperti yang ada di Desa Banjararum.

Dari diskusi yang berkembang tampak bahwa integrasi atau kolaborasi antarlembaga memang belum banyak berkembang. Masing-masing lembaga lebih banyak memfokuskan diri pada bidang kegiatan usaha masing-masing, melakukan produksi barang dan jasa secara sendiri-sendiri, melakukan pemasaran juga sendiri-sendiri. Belum ada cerita bahwa lembaga yang telah dibentuk lama melakukan penandatanganan kerja sama bisnis atau usaha dengan lembaga lain untuk meningkatkan daya tawar mereka. Masing-masing datang dan menjual sendiri ke “pasar” untuk berhadapan dengan pelaku-pelaku usaha yang memiliki kemampuan modal dan informasi dan pengetahuan yang lebih kuat.

Pendek kata, masalah yang dihadapi oleh anggota-anggota kelompok dari waktu ke waktu seolah masalah klasik yang tidak ada jalan keluarnya. Sebagaimana ditegaskan oleh peserta FGD yang mewakili kelompok pengairan (P3A). Seperti diketahui ada siklus setiap tahun ada proses pengeringan untuk penelusuran jaringan dan kerusakan, dan setiap 5 tahun untuk pengeringan besar selama 1/3 bulan. Pada saat ini telah ada jaringan sistem pengairan Kalibawang yang salah satunya berasal dari Waduk Sermo. Kebijakan irigasi menurutnya sudah bagus karena diatur oleh Peraturan Bupati yang salah

satu tujuannya untuk pertanian khususnya untuk penanganan hama. Namun menurut wakil P3A tersebut, perlu diikuti dengan kebijakan peningkatan pengelolaan pascapanen sehingga dapat berpotensi memajukan kawasan khususnya dalam agrowisata. Karena sebagai apa pun sistem irigasi, pertanian terutama agrowisata akan sulit untuk maju tanpa peningkatan dalam pascapanen. Ia mengungkapkan pengamatannya bahwa petani di Kalibawang dan Kulonprogo pada umumnya adalah “petani gurem” atau sangat jarang petani mempunyai lahan sampai 1 hektar sehingga hasilnya boleh dibilang hanya cukup untuk makan. Belum lagi pada saat panen, petani juga sering merugi karena fluktuasi harga. Oleh karenanya, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan petani dengan karakteristik tersebut, salah satu yang patut dikembangkan adalah mengintensifkan lahan melalui penganeekaragaman tanaman seperti buah dan sayur-mayur yang memiliki harga jual tinggi. Demikian juga seorang wakil dari koperasi unit desa misalnya, mempertanyakan peran koperasi yang seharusnya menjadi sokoguru perekonomian, tetapi terbebani oleh program pemerintah dalam penyaluran pupuk misalnya.

Selain kelompok-kelompok masyarakat, ada lembaga pemerintah yang juga telah berkibrah lama di Kecamatan Kalibawang. Lembaga itu adalah Balai Penyuluhan Pertanian. Lembaga ini sebenarnya berpotensi untuk membantu dan memberdayakan para petani di kawasan. Sebagaimana disampaikan oleh wakil dari BPP bahwa lembaganya sering mengadakan pelatihan dan pemberdayaan.

Namun wakil dari BPP tersebut tidak banyak cerita tentang apa yang selama ini telah dilakukan lembaga itu terutama dalam pemberdayaan kelompok tani dalam hal penguatan kapasitas kelembagaan. Sebagai institusi yang memiliki tupoksi pengembangan kapasitas masyarakat di bidang pertanian, BPP sebenarnya berpotensi menjadi salah satu “motor” bagi pengembangan sumber daya manusia. Beberapa pertanyaan yang masih perlu jawaban lebih lanjut adalah apakah lembaga ini dapat menjadi bagian dalam upaya integrasi kawasan menjadi salah satu pilar pengembangan SDM, yang mampu

tidak hanya mengembangkan kapasitas dalam meningkatkan produksi, tetapi juga dalam distribusi/pemasaran terintegrasi dengan wisata. Melalui *training of trainers* yang dilakukan, apakah BPP juga dapat melahirkan pusat-pusat kegiatan belajar masyarakat (*community learning centre*) yang lebih mandiri dalam mencari solusi yang dihadapi oleh masyarakat.

Kesan bahwa masing-masing pelaku dan kelembagaan masyarakat masih “jalan sendiri-sendiri” juga diungkap oleh wakil dari BKAD (Badan Koordinasi Antar Desa) yang kebanyakan anggotanya berasal dari perangkat desa. Menurutnya, integrasi dan kolaborasi juga semestinya ada di lingkungan pemerintahan, sembari dicontohkannya ketika Embung Tonegoro awalnya dibangun oleh dinas pertanian, namun belakangan ada dinas pariwisata yang berperan di sana. Tidak ada titik temu dalam hal pengelolaan membuat integrasi kelembagaan juga sulit terwujud. Meskipun ia juga mencontohkan ada pula kasus baik ketika ada pembagian peran yang membuat integrasi dapat berjalan dengan baik, misalnya dalam kasus pengembangan kakao.

Melalui dua contoh kasus embung dan kakao tersebut, sebenarnya peluang integrasi tetap harus dikembangkan. Dalam kasus pengembangan Kawasan Agrowisata integrasi antarlembaga pemerintah/birokrasi, kelompok-kelompok masyarakat, dan pelaku usaha lain, ada usulan dari BKAD untuk mengembangkan *incubator* ekonomi lokal atau produk desa, baik pada aras (*level*) desa, kecamatan, maupun kawasan.

Dalam kerangka integrasi pengembangan kawasan, saat ini BKAD telah membentuk apa yang disebut sebagai pengembangan inkubator produk desa, dan telah memulainya dengan melakukan pemetaan di 6 desa berikut pemetaan sosial-budaya yang ada di tempat masing-masing.

Pada tempat yang lain telah ada juga beberapa inisiatif dalam masyarakat untuk mengembangkan integrasi dari komoditas dalam rangka menggarap pascapanen. Masalah klasik yang sering muncul dari petani kakao di Kalibawang maupun di banyak tempat lain adalah

banyaknya tanaman yang telah rusak sehingga perlu peremajaan tanaman. Tingkat persebaran yang tidak merata di desa-desa kawasan tentu ada baiknya tidak perlu didorong untuk pengembangan dari sisi luasan (ekstensifikasi), tetapi ada pada upaya alternatif misalnya dengan meningkatkan produktifitas tanaman sekaligus meningkatkan proses pascapanen-nya. Dengan berfokus pada orientasi itu berpeluang juga makin meningkatkan potensi nilai tambah yang diterima oleh masyarakat, sebagai alternatif dari penanaman kembali. Saat ini misalnya telah ada upaya untuk mengembangkan pascapanen kakao dengan tanaman lain yang ada di wilayah itu, menjadi “coklat pegagan”. Strategi pembauran (*mixing*) produk olahan berdasarkan potensi lokal yang ada, tentu menjadi salah satu alternatif pilihan pengembangan.

Pola integrasi yang ditemukan telah menjadi praktik integrasi dalam pengelolaan agrowisata sebenarnya telah dipraktikkan oleh Dolan Ndeso, sebuah lembaga swasta yang mencoba melakukan integrasi kelembagaan untuk mengembangkan potensi yang ada di desa. Kebetulan bisnisnya telah berkembang sejak dua tahun terakhir, bahkan sebagai model integrasi, model Dolan Ndeso dapat dijadikan sebagai miniatur model integrasi pengembangan kawasan. Box berikut menceritakan hal-hal penting yang harus dilakukan untuk mengembangkan integrasi atau kolaborasi antar-lembaga-lembaga.

Box 1. Bagaimana Mengembangkan Bisnis Wisata?

Wisata harus menjadi tumpuan utama yang dapat menjadi jalan tercepat memajukan wilayah. Petani selalu dihadapkan dilema, mereka bekerja keras sehari, berbulan, bahkan bertahun, menanam untuk dapat untung. Saat panen harga justru merosot, petani gigit-jari. Jika dirombak dari sudut pandang agrowisata, produk bukan hanya pangan, tetapi diperlakukan sebagai “oleh-oleh”. Pendek kata, pertanian tidak diperlakukan “seperti biasanya”.

Karena wisata adalah bisnis, semua produk harus dirancang berkesinambungan bukan hanya seremonial atau hanya diperlakukan sekali-kali saja. Yang harus dikejar adalah bagaimana menemukan cara memutar uang agar siklus produksi tetap berlangsung. Karena berkesinambungannya produksi, perlu dipikirkan bagaimana mengemas, promosi, dan memasarkan.

Pengalaman seringkali terjadi, pelatihan hanya dilakukan dalam rangka berjalannya program pemerintah. Untuk merombah mindset dengan pola seperti itu maka dibutuhkan praktisi yang secara kontinu berperan sebagai pendamping untuk membantu proses-proses mengemas, promosi, dan memasarkan. Hal lain yang diperlukan adalah kreativitas karena hampir seluruh potensi yang ada di kawasan (Agrowisata Menoreh) saat ini sebenarnya sudah ada di berbagai tempat di Yogyakarta.

Pengalaman Dolan Deso tetap bisa berkembang di antaranya adalah karena ada kreativitas dalam memahami keinginan dan kebutuhan para wisatawan. Kami membuat program “baca padi” dengan menawarkan kepada para tamu untuk belajar dan bereksplorasi menyangkut pengetahuan baru tentang padi.

Jika ingin melakukan kolaborasi/integrasi, harus dihidupkan titik-titik wisata yang sudah ada dan model bisnis yang bagus dan menarik. Kolaborasi bisnis melalui BUMDes Bersama, ada baiknya mulai memfokuskan pada “pembelian” produk-produk masyarakat, memikirkan pelabelan atau pengemasan, dan memasarkannya melalui titik-titik wisata yang ada. Jangan menitipkannya di supermarket karena susah bersaing. Diperlukan model pengelolaan usaha yang baik dulu seperti apa, baru berbicara soal integrasi. Bagaimanapun bisnis wisata harus berorientasi pada keuntungan ekonomi.

Apa yang dikelola Dolan Deso sejak 2016 adalah membangun kemitraan dengan kelompok masyarakat di Desa Banjarasri dan sekitarnya meliputi kuliner, pemuda, kesenian, dll. Ada 35 rumah di sekitar yang bisa digunakan menginap. Pada awalnya sulit..... Tapi siapa mengira saat ini, melalui bisnisnya, ia dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat karena nilai tambah yang lebih besar diterima dibanding sebelumnya. Termasuk bagi pemerintah, tak kurang dari 200 juta setiap bulannya masuk ke kas pemerintah atas pajak yang dikenakan.

(Sugihartono, Pendiri dan Pengelola Dolan Deso, Banjarasri, Kalibawang)

Box 2. “Api di Bukit Menoreh”,

Sepenggal Cerita dari FGD di Samigaluh, 3 Agustus 2018

Api di Bukit Menoreh karya S.H. Mintardja menjadi salah satu inspirasi untuk mengembangkan kawasan Agrowisata Bukit Menoreh Kulonprogo. Banyak orang saat ini memimpikan kawasan perbukitan Menoreh yang masih tergolong miskin, mampu mengejar dengan cepat ketertinggalannya, memfokuskan diri, mesu budi (mengerahkan seluruh potensi diri), untuk belajar ilmu (kanuragan), agar mampu berbicara lebih banyak dalam dunia (persilatan).

Cerita fiksi yang hampir dikenal oleh semua orang Yogya atau dari manapun yang pernah tinggal dan mengenyam pendidikan di kota pelajar ini era delapan puluh hingga dua ribuan, pasti pernah mendengar, mengetahui, bahkan menggemari cerita itu sehingga membuat kisah itu melegenda di Indonesia.

Ketika pemerintah menetapkan kawasan pegunungan Menoreh di wilayah utara Kabupaten Kulonprogo, tak urung legenda kisah Api di Bukit Menoreh menjadi salah satu inspirasi, tidak hanya untuk mengembangkan potensi wilayah melalui pengembangan agrowisata, tetapi juga agar masyarakat di sana juga dapat menikmati hasil-hasilnya melalui pengembangan manusia dan potensi yang luar biasa dalam diri masyarakat itu, layaknya semangat Agung Sedayu salah satu pemeran dalam cerita silat tersebut, ketika berusaha bangkit dari keterpurukan.

Diharapkan adanya publikasi yang lebih gencar tentang Samigaluh terutama terkait perbukitan Menoreh yang dipadukan dengan semua potensi wisata yang ada. Dari segi komoditas yang bisa dijual adalah kopi karena sudah paling terkenal lebih dahulu. Hanya saja belum ada *branding* yang disepakati antara Kopi Menoreh atau Kopi Suroloyo. Dan lebih baik dikembangkan juga berbagai fasilitas wisata lainnya yang bisa membuat wisatawan akan kembali ke Kulonprogo misalnya penginapan atau sarana hiburan lainnya yang mengandung budaya dan edukasi.

Masih banyak potensi lain yang bisa dikembangkan. Maka diperlukan kerja sama seluruh anggota masyarakat baik oleh birokrasi maupun kelompok masyarakat. Diharapkan setelah adanya kajian ini akan ada kelanjutan kegiatan dalam bentuk program-program pendampingan masyarakat yang nantinya tercapai integrasi pengelolaan kawasan khususnya wisata.

Kolaborasi melalui BUMDES Bersama

Pembangunan bandara *New Yogyakarta International Airport (NYIA)* dan siap beroperasinya pelabuhan, akan membuat kawasan Kulonprogo menjadi semakin ramai. Kawasan Agrowisata Menoreh Terpadu, diharapkan dapat menjadi kawasan atau daerah penyangga wisata Borobudur, agar letak strategis itu dapat memberi dampak pada perbaikan kehidupan masyarakat.

Terdapat beberapa persoalan menyangkut Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan (RPKP) yang pada tahun 2016 telah mulai dikembangkan. Dari segi dasar hukum, pengembangan Kawasan Agrowisata Menoreh Terpadu masih belum memiliki payung hukum. Dalam FGD terungkap bahwa isi RPKP dan payung hukumnya harus segera diselesaikan agar bisa terintegrasi seluruh wilayah Agrowisata Menoreh Terpadu.

Menurut Dinas Pemberdayaan Kulonprogo, di dalam RPKP ada berbagai unit yang salah satunya adalah unit usaha yang diharapkan dapat menampung produk unggulan desa. Selain skema kolaborasi yang diharapkan muncul dari studi yang dilaksanakan saat ini, masih

butuh skema kolaborasi supaya RPKP yang ditujukan untuk terpadunya wilayah bisa segera terlihat kemajuannya. Karena belum adanya payung hukum dan fiksasi RPKP mungkin yang menyebabkan kolaborasi selama ini tidak pernah bisa dilakukan.

Meski program pengembangan Kawasan Agrowisata Menoreh Terpadu menurut beberapa catatan telah dilakukan melalui diskusi bersama masyarakat, namun kesan bahwa kebijakan dan program ini cenderung *top-down* sulit untuk dipungkiri. Kesan ini terasa ketika baik pada aras (*level*) pemerintah (kecamatan dan desa) masih banyak yang belum mengetahui dan kalau mengetahui pun masih sangat terbatas informasinya. Beberapa bahkan belum pernah melihat dokumen RPKP yang telah disusun pada tahun 2016. Meskipun informasinya masih terbatas, namun beberapa hal terkait pengembangan kawasan, seperti desa-desa mana yang dimasukkan di dalam kawasan dan tujuan yang ingin dicapai sedikit banyak telah dapat dipahami.

Dalam kaitannya dengan penetapan produk unggulan desa, ada beberapa klasifikasi khusus atau komoditas unggulan yang disepakati yaitu durian dan kakao. Ada pula desa-desa yang berdasarkan potensi desanya terdapat kopi, manggis, dan krisan.

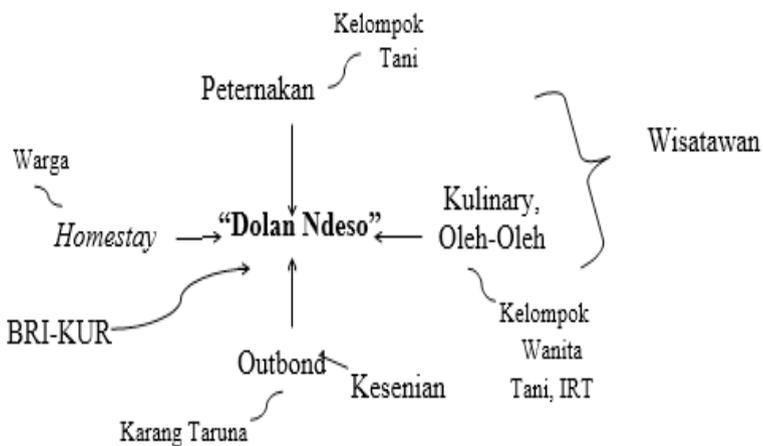
Selain peningkatan pertanian juga optimalisasi produk unggulan lainnya, ada juga program desa sejahtera mandiri dan pengembangan inkubator produk unggulan desa yaitu rumah pajang/gerai dan ada di lembaga BUMDes. Agar semuanya sinkron dengan hasil bumi dan pelestarian adat istiadat harus ada semacam sentra produksi dan pemasaran (*marketing*) produk desa. Selain itu dipersilakan juga jenis wisata edukasi dalam bentuk *leave in again*, yakni ikut membuat barang-barang khas wisata. Yang paling penting juga adalah pengembangan kualitas SDM. Produksi alam yang belum dieksplorasi juga masih banyak, salah satunya adalah cengkeh. Dari segi partisipasi masyarakat juga dirasakan sudah semakin meningkat.

Hasil BKAD: membentuk BUMDesA. Salah satu fungsinya adalah menampung bantuan dari Kementerian Desa. Orang-orang yang ada di BKAD sebagian besar adalah dari kecamatan/kepala desa.

Sudah terbentuk dan sudah ada susunan pengurus serta orang-orang untuk mengisi posisi-posisi tersebut. Selama ini BUMDesA baru bisa berkomunikasi dengan pendamping desa yang meminta usulan strategi pelaksanaan kolaborasi. Namun ada kebutuhan untuk dihardirkan berbagai macam ahli terutama dalam bidang pengembangan ekonomi kawasan dan BUMDesA. Lokasi rumah pajang: rencananya di Desa Banjar Arum. Kegiatan riil belum ada kecuali pembuatan proposal. Sesama pengurus BKAD/BUMDesA bahkan belum pernah melakukan pertemuan. Paling pokok yang harus dilakukan adalah bantuan dana pokok karena dana dari Kemendes dan PDDT tidak dapat digunakan untuk urusan operasional.

Miniatur Model Integrasi Antarlembaga

Salah satu tujuan kajian ini adalah menemukenali praktik-praktik integrasi antar-lembaga yang telah ada dalam masyarakat. Salah satu temuan model integrasi antar-lembaga dapat ditemukan pada kasus pengelolaan Dolan Ndeso di Desa Banjarasri, Kalibawang. Secara garis besar pola atau model kerja sama antarlembaga tersebut dapat dilihat pada Gambar IV.1.



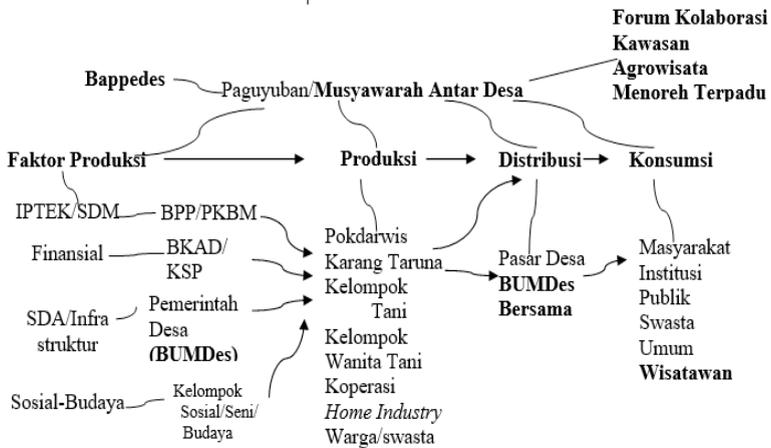
Gambar IV.1. Model Integrasi Kemitraan Swasta dan Masyarakat

Miniatur integrasi antarlembaga ditemukan dalam model kolaborasi antara pelaku wisata swasta, dalam hal ini Dolan Ndeso dengan kelompok masyarakat di kawasan agrowisata. Dolan Ndeso yang dirintis sejak tahun 2016 dan menawarkan konsep wisata desa terpadu sudah menjadi salah satu spot wisata yang ramai dikunjungi wisatawan. Keberhasilan Dolan Ndeso merefleksikan bekerjanya integrasi antara sektor swasta dan masyarakat dalam memajukan pariwisata perdesaan.

Dolan Ndeso mengkolaborasikan berbagai peran wisata lembaga/kelompok masyarakat, seperti Karang Taruna yang terlibat dalam pelaksanaan *outbond* bagi wisatawan. Kebutuhan kuliner dan oleh-oleh wisatawan dipenuhi melalui kemitraan dengan Kelompok Wanita Tani dan industri rumah tangga (IRT) setempat. Paket wisata alam bernuansa aktivitas pertanian dan peternakan perdesaan dikerjasamakan dengan kelompok tani dan kelompok ternak. Sementara layanan penginapan disediakan warga masyarakat melalui *homestay* mereka. Bahkan Dolan Ndeso menjadi jembatan akses Kredit Usaha Rakyat oleh BRI ke kelompok ekonomi mitra.

Berbagai Alternatif Model Integrasi Antarlembaga di KAMT

Berdasar hasil-hasil amatan, wawancara mendalam, dalam tiga kali *focus group discussion* (FGD) serta *workshop* dengan para pemangku kepentingan Kawasan Agrowisata Menoreh Terpadu (KAMT), dapat dirancang beberapa model integrasi antarlembaga. Model-model yang dimaksud adalah sebagai berikut:



Gambar IV.2. Model Integrasi Berbasis Sistem Ekonomi Kerakyatan

Model integrasi ini (Gambar IV.2) didasarkan pada pola relasi antar pelaku/lembaga ekonomi di Kawasana Agrowisata Menoreh Terpadu (KAMT), yang meliputi aspek produksi, distribusi, konsumsi, dan penguasaan faktor-faktor produksi. Berangkat dari bekerjanya sistem ekonomi kerakyatan, di mana terdapat partisipasi tinggi masyarakat dalam berbagai aspek tersebut maka dapat ditemukan *positioning* peran Musyawarah Antar Desa (MAD) dan BUMDes Bersama dalam integrasi antarlembaga kawasan. Dalam konteks pariwisata, realisasi sistem ekonomi kerakyatan dilihat dari berkembangnya *community based tourism*.

Dalam sistem ekonomi kerakyatan tersebut perlu dipastikan faktor-faktor produksi tersedia dan dapat dikuasai oleh anggota-anggota masyarakat. Faktor produksi tersebut meliputi **faktor produksi/modal intelektual**, yang terdiri dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan SDM dan dalam konteks KAMT dapat dikelola oleh Badan Penyuluh Pertanian (BPP) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Kedua lembaga ini dapat berfungsi sebagai Perguruan Tinggi Desa (PTDes) yang menyediakan dukungan pendidikan bagi pembangunan manusia dan kelembagaan pariwisata di kawasan.

Penyediaan **faktor produksi/modal material** berupa modal finansial dilakukan oleh USP BKAD dan Koperasi setempat yang bergerak di usaha simpan pinjam. Sementara modal sumber daya alam seperti aset wisata dan infrastruktur pendukung pariwisata kawasan dikelola oleh Pemerintahan Desa satu kawasan, dalam hal ini dapat dikuasakan kepada BUMDes untuk pengelolaan usaha terkait SDA seperti air, tambang, listrik, dan sebagainya. Sedangkan **faktor produksi/modal institusional/sosial** menjadi ranah (*domain*) lembaga kelompok sosial, seni, dan budaya di KAMT.

Adapun kegiatan **produksi** menjadi ranah tenaga-tenaga produksi di tengah-tengah masyarakat, yang terhimpun dalam berbagai lembaga/kelompok seperti Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Karang Taruna, Usaha Bersama, Industri Rumah Tangga (*Home Industry*), dan warga masyarakat. Lembaga ini berperan dalam memproduksi baik barang maupun jasa perdesaan, baik untuk kebutuhan domestik masyarakat perdesaan maupun untuk pemenuhan pasar eksternal, termasuk wisatawan dalam dan luar negeri.

Kegiatan **distribusi** juga dilakukan secara terpisah (parsial) dan terbatas oleh masing-masing lembaga tersebut. Di samping itu, distribusi juga dilakukan melalui kegiatan perdagangan di pasar-pasar desa. Dalam konteks ini tersedia ruang bagi peranan BUMDes Bersama dalam distribusi produk barang dan jasa pariwisata terpadu, berkolaborasi dengan lini produksi dan distribusi yang ada di KAMT.

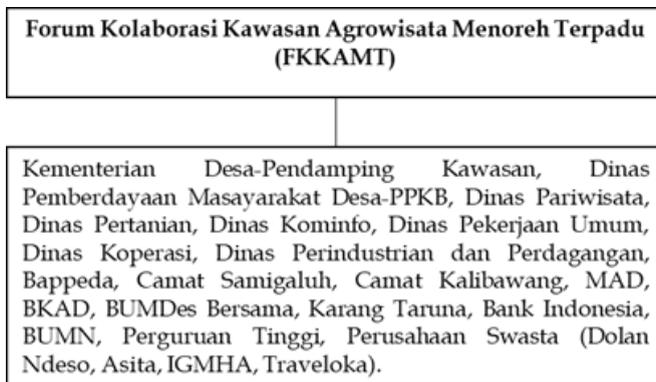
Dalam pada itu sistem ekonomi kerakyatan memastikan bagaimana **konsumsi** masyarakat, institusi publik (lembaga pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan), dan sektor swasta, sebagian besar berasal dari faktor produksi, kegiatan produksi, dan distribusi lembaga-lembaga ekonomi setempat tersebut. Keterkaitan dengan konsumen umum dan wisatawan baik lokal, nasional, maupun internasional, juga menjadi bagian dari ruang lingkup konsumsi ini.

Agar kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi tersebut dapat berlangsung di bawah pimpinan dan atau penilikan (pengawasan) anggota-anggota masyarakat sesuai kaidah Sistem Ekonomi

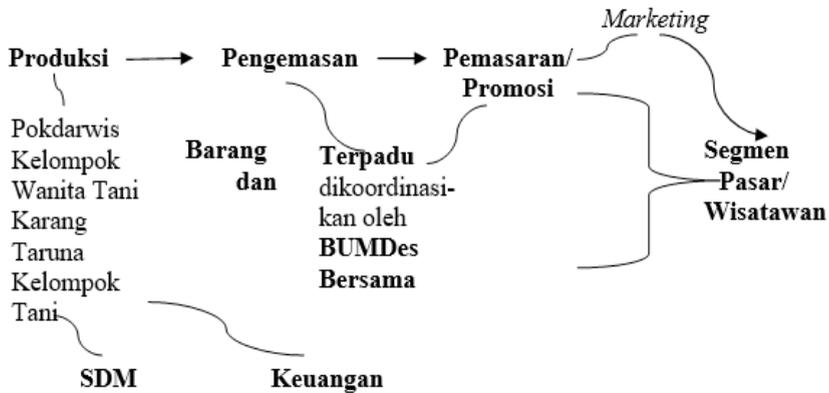
Kerakyatan, maka diperlukan penguatan fungsi (revitalisasi) **Musyawarah Antar-Desa (MAD)**. MAD diharapkan dapat merepresentasikan seluruh pelaku/lembaga yang ada (*existing*) di kawasan dengan pengambilan keputusan strategis-sistemik yang dilakukan secara kolektif melalui musyawarah rutin (bulanan, *selapanan*).

Integrasi antarlembaga sesuai mandat MAD dalam hal ini dapat dioperasikan/dilembagakan melalui pembentukan **Badan Perencanaan Pembangunan Desa (Bappedes)**, yang dalam hal ini dapat membentuk **Badan Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan (Bappekades)**. Badan ini yang akan mengintegrasikan antarlembaga di KAMT dan dengan lembaga vertikal seperti Bappeda, Dinas-Dinas Pemerintah Daerah, Bappenas, Kementerian Pemerintah Pusat, dan lembaga horizontal eksternal seperti Perguruan Tinggi, Koperasi, Perusahaan Swasta, dan sebagainya.

Integrasi antarkementerian, antardinas (Organisasi Perangkat Daerah/OPD), antarprogram, dan antarlembaga eksternal baik vertikal maupun horizontal dilembagakan melalui pembentukan **Forum Kolaborasi Kawasan Agrowisata Menoreh Terpadu (FKKAMT)**. Forum ini dapat dibentuk melalui SK Bupati Kulon Progo, untuk memobilisasi dan mensinergikan berbagai sumber daya dan program pengembangan kawasan. Selengkapny susunan anggota forum sekurang-kurangnya digambarkan dalam bagan di bawah ini (Gambar IV.3):



Gambar IV.3. Forum Kolaborasi



Gambar IV.4. Model Integrasi Bisnis Sosial

Model pada Gambar IV.4 ini adalah model mikro bagaimana integrasi antarlembaga dapat dilakukan oleh BUMDes Bersama melalui pengembangan bisnis sosial (*social business*). Dalam hal ini model bisnis BUMDes Bersama adalah melayani, memfasilitasi, memberdayakan, mengembangkan, dan berbagai fungsi bisnis lain yang bersifat mendukung peningkatan nilai tambah dan pengembangan bisnis masyarakat, seperti halnya pengemasan dan pemasaran menggunakan bauran pemasaran (*marketing mix*). Peningkatan nilai tambah bisnis masyarakat inilah yang sebagian diantaranya menjadi hasil (*return*) dan modal BUMDes Bersama.



Gambar IV.5. Integrasi Digital-Spasial

Model yang ditunjukkan pada Gambar IV.5 di atas melihat integrasi dapat dilakukan melalui kombinasi pendekatan spasial dan digital. BUMDes Bersama dapat menjadi motor integrasi spasial dengan mendesain paket-paket wisata kawasan dengan berbagai kombinasi/pilihan diantara *spot*/destinasi wisata kawasan yang sudah unggul seperti halnya Puncak Suroloyo, Embung Tonegoro, Sendangsono, Bunga Krisan, dan Dolan Ndeso, dengan yang masih taraf tumbuh dan berkembang. Integrasi spasial akan terbantu melalui integrasi digital, di mana BUMDes Bersama berkolaborasi dengan manajemen destinasi wisata tersebut mengemas pemasaran bersama secara daring (*online*) melalui *e-marketing* dan pembuatan *local marketplace*. BUMDes Bersama menjadi motor transformasi kawasan Menoreh menuju era digital (Menoreh 4.0).

Dalam upaya mendukung integrasi spasial-digital tersebut, BUMDes Bersama mendukung pengembangan sarana-prasarana wisata seperti halnya *homestay*, *showroom*, wisata kuliner, dan berbagai atraksi seni budaya. BUMDes Bersama dalam hal ini dapat mengelola kegiatan (*events*) seperti Festival Budaya dan berbagai kegiatan berbasis sosio-kultural lainnya di kawasan.

Pelajaran dari Pujon dan Nglanggeran

Kabupaten Malang memiliki potensi alam yang berhasil dimanfaatkan untuk pembangunan desa berbasis partisipasi masyarakat melalui pengelolaan ekoturisme Pujon di Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Pelaksanaan model pengelolaan ekoturisme ini dapat menjadi pembelajaran dalam hal proses integrasi dan demokratisasi pembangunan desa DNA praktik terbaik UU Desa. Ada beberapa hal yang dapat dipelajari dari Kabupaten Malang, antara lain:

Salah satu tantangan terbesar dalam lingkungan birokrasi yaitu adanya ego sektoral. Seringkali program yang cukup bagus harus terkendala karena terbentur oleh polemik ego sektoral yang ada di tingkat birokrasi itu sendiri. Hal ini yang juga harus dihadapi oleh pemerintahan Desa Pujon Kidul. Kepala Desa Pujon Kidul menyatakan

bahwa banyak sekali aktor di birokrasi terjebak pada keinginan untuk tampil sebagai tokoh utama yang pada akhirnya membuat program yang harusnya berjalan tidak dapat dilaksanakan. Satu-satunya yang dapat diandalkan adalah *political will* dari Kepala Desa untuk tidak terjebak di hal yang sama dan melaksanakan kesempatan dari UU Desa yang telah memberikan kendali lebih banyak di tingkat desa.

UU Desa telah memberikan kesempatan untuk desa memegang kendali yang lebih besar dalam hal pengelolaan dana desa. Setiap desa telah diberikan kesempatan yang sama, dana yang sama, dan memiliki potensi masing-masing untuk dikembangkan. Yang menjadi penentu selanjutnya adalah keinginan Kepala Desa untuk menangkap segala kesempatan dan potensi tersebut. Kepala Desa tidak perlu ikut terjebak dalam polemik birokrasi dengan melibatkan warga ke dalam program pembangunan desa. Jika pemerintahan desa gagal melakukan aliansi dengan bagian birokrasi lainnya, maka yang terpenting adalah terjalinnya aliansi dengan komunitas masyarakat itu sendiri.

Harapan terjadinya integrasi birokrasi merupakan tujuan yang bagus untuk dicapai. Namun sementara waktu ketika tujuan tersebut belum dapat dicapai, maka hal utama yang harus dilakukan adalah proses peningkatan partisipasi masyarakat dalam program-program pemerintah desa. Setelah terjadinya integrasi dengan komunitas masyarakat dan sudah mampu menampilkan hasil nyata, maka pada umumnya antaraktor di birokrasi mulai dapat lebih mudah untuk diajak melangkah lebih maju dalam pembahasan proses kerja sama program atau integrasi birokrasi.

Hal utama yang harus dilakukan untuk membuat komunitas masyarakat mau terintegrasi dengan pemerintah yaitu dengan menyediakan jaminan bahwa keberadaan mereka tidak hanya sebagai simbol namun juga posisi nyata untuk mengelola sumber daya produktif wilayah. Dalam kasus Desa Pujon Kidul, komunitas masyarakat dijadikan sebuah unit yang resmi dalam BUMDes untuk mengelola pariwisata. Komunitas masyarakat yang menjadi pengelola resmi pariwisata berada di dalam payung Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).

Kelompok ini terdiri dari pemuda/Karang Taruna, wanita/PKK, dan Gapoktan (petani dan peternak). Pokdarwis yang berada di dalam unit pariwisata BUMDes berwenang untuk mengelola seluruh kegiatan pariwisata (ekowisata) yang dimiliki oleh BUMDes yaitu *homestay*, pengolahan bahan makanan untuk cemilan dan oleh-oleh, sanggar seni, dan wisata edukasi terkait pertanian dan peternakan. Setelah masyarakat merasakan manfaat partisipasinya dalam pembangunan desa dengan adanya wewenang mengelola sumber daya produktif desa melalui ekowisata, masyarakat juga mulai terlibat lebih jauh dalam proses pengambilan keputusan melalui berbagai pertemuan rutin dengan pemerintah desa. Selain berwenang dalam pengelolaan ekowisata, masyarakat juga berwenang mengelola pendataan masyarakat misalnya kelahiran, kematian, pendidikan, dan lain-lain. Masyarakat di tingkat kepala keluarga dapat mengakses pembaharuan data melalui teknologi informasi yang terintegrasi dan data tersebut akan muncul sebagai data resmi pemerintah desa.

Sementara itu, Desa Nglanggeran Kabupaten Gunungkidul memiliki aset yang potensial bagi pengembangan wisata berbasis masyarakat (*community based tourism*), baik dalam bentuk aset fisik (material) berupa Gunung Api Purba, embung, lahan pertanian, perkebunan dan hutan, maupun aset non-fisik (intelektual dan institusional) seperti kader-kader muda yang kreatif dan visioner, sistem nilai sosial budaya yang masih terjaga, organisasi lokal yang aktif dan sinergis, jejaring dengan banyak pihak di luar desa yang baik, serta berbagai teknologi yang sudah berkembang di tengah-tengah masyarakat seperti halnya teknologi produksi, teknologi informasi, dan teknologi pemasaran. Ekowisata yang sudah berkembang diikuti berkembangnya bisnis di tengah-tengah masyarakat seperti *homestay*, olahan pangan, kerajinan, kuliner, dan toko, sebagai modalitas pengembangan bisnis dan kewirausahaan hijau di tengah-tengah masyarakat.

Masyarakat Desa Nglanggeran khususnya kelompok sadar wisata dan karang taruna menjadi motor penggerak di desa. Kelompok ini juga menunjukkan kemampuan untuk menyerap berbagai kegiatan

yang dilakukan oleh pihak-pihak dari luar desa. Penerapan hasil riset merupakan salah satu contoh dari kemampuan tersebut. Di tengah berbagai kendala dan permasalahan yang masih dihadapi, keberadaan Pokdarwis mampu menjadi jembatan sinergi para pihak yang terkait dalam pengembangan ekowisata dan perekonomian desa Nglanggeran.

Keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan merupakan hal yang sangat penting bagi keberlanjutan dan keberhasilan suatu program. Masyarakat memiliki semangat dan kemauan untuk belajar dan mengikuti program yang dilakukan baik dari dalam desa maupun luar desa.

BAB V

KESIMPULAN

DAN REKOMENDASI

Berdasar hasil penelitian dan analisis pembahasan, maka disampaikan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

Kesimpulan

Spot/destinasi wisata di Kawasan Perdesaan Agrowisata Menoreh Terpadu dan berbagai unsur pendukungnya dikelola secara terpisah oleh kelompok-kelompok masyarakat di masing-masing desa. Lembaga-lembaga tersebut cenderung masih “jalan sendiri-sendiri” dengan ego kewilayahan masing-masing. Pola integrasi/kolaborasi yang ditemukan adalah pola “Dolan Ndeso”, yaitu kemitraan swasta-masyarakat, di mana pelaku usaha swasta (Dolan Ndeso) bermitra dengan Karang Taruna, Kelompok Wanita Tani, Kelompok Ternak, *home-industry*, dan warga sekitar dalam pengelolaan paket wisata desa.

Keberhasilan (*success factors*) pengembangan wisata perdesaan berbasis masyarakat (*community based tourism*) di tiga desa dalam studi ini (Nglanggeran, Ponggok, dan Pujon Kidul) dapat disimpulkan dipengaruhi oleh kepemimpinan (*leadership*) yang dipercaya dan amanah. Kepemimpinan ini juga diwarnai oleh *political will* perangkat desa, agar pelaku ekonomi rakyat di desanya dapat berkembang mandiri, terpupuk dan terfasilitasi semangat kewirausahaannya

(*entrepreneurial spirit*). Anak-anak muda yang peduli, kreatif, dan inovatif, juga diberi peluang berkreasi, menyamakan visi membangun desa berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya termasuk dalam memanfaatkan teknologi informasi. Keberhasilan di tiga desa kasus sebenarnya juga telah dipraktikkan secara berhasil dalam kasus Dolan Ndeso di desa Banjarasri, salah satu desa di KAMT. Permasalahannya adalah bagaimana mendorong ke atas (*bottom-up*) berbagai keberhasilan pada aras desa ke aras kawasan.

Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah melakukan revitalisasi Musyawarah Antar Desa (MAD) sebagai basis integrasi antarlembaga. Prinsip-prinsip kepemimpinan yang amanah dan dapat dipercaya pada aras desa, harus dinaikkan pada aras kawasan. Tentu ini membutuhkan waktu, tetapi harus dimulai jika ingin berhasil. Misalnya, prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan secara berhasil dalam praktik tata-kelola kerja sama di Dolan Ndeso. Prinsip-prinsip ini juga harus diterapkan dalam pola kerja sama pada aras kawasan. Inisiasi Forum Kolaborasi Kawasan Agrowisata Menoreh Terpadu (FKKAMT) sebagai usulan mode integrasi vertikal, harus dikembangkan dengan pola tersebut. Demikian pula BUMDes Bersama yang diharapkan menjadi motor integrasi/kolaborasi, karena membawa misi pengembangan usaha atau bisnis, harus pula dikembangkan melalui pola yang dapat diukur kinerjanya berdasarkan ukuran bisnis atau usaha.

Pada tahapan selanjutnya, model integrasi antarlembaga yang sudah melalui proses validasi dan relevan dalam konteks Kawasan Agrowisata Menoreh Terpadu, dapat dikembangkan dalam suatu peta-jalan (*roadmap*). Dalam penyusunan peta jalan, beberapa dimensi pengembangan model dapat disusun dengan mempertimbangkan tiga pilihan, yakni:

Pertama, **model integrasi berbasis sistem ekonomi kerakyatan**. Dalam model ini, integrasi antarlembaga dalam kawasan dapat dipetakan berdasarkan lapangan usaha (produksi, distribusi, konsumsi, penguasaan faktor-faktor produksi) yang telah digeluti oleh segenap

komponen masyarakat desa. Model ini bisa juga disebut sebagai model makrokawasan. Dukungan pemerintah desa, swasta, atau pihak lain, dikembangkan dalam bentuk kerja sama atau kolaborasi dengan menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan (bukan meniadakan). Dalam model ini BUMDes Bersama misalnya, dapat menjadi manifestasi peran pemerintah dalam pengelolaan faktor produksi berbasis sumber daya alam (air, listrik, tambang, dsb) dan peran distribusi.

Kedua, model integrasi bisnis sosial (social business), merupakan model mikrobisnis di mana BUMDes Bersama berperan sebagai perusahaan sosial (*social enterprises*) yang menjalankan bisnis sosial (*social business*), yaitu bisnis yang berorientasi pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah bisnis masyarakat yang sudah ada (*existing*).

Ketiga, model integrasi spasial-digital, di mana BUMDes Bersama berperan dalam mengintegrasikan *spot*/destinasi wisata kawasan secara spasial dan membangun kolaborasi bersama lembaga pengelola destinasi wisata tersebut. BUMDes Bersama juga berperan vital dalam transformasi kawasan menuju kawasan berbasis teknologi dan sistem informasi (Menoreh 4.0), melalui pengembangan produk *brand* kawasan, *local marketplace* dan *e-marketing* wisata kawasan.

Rekomendasi

Integrasi dan kolaborasi internal/horizontal kawasan memerlukan penguatan komunalitas kawasan. Upaya ini perlu dilakukan dengan melakukan **revitalisasi kelembagaan dan fungsi Musyawarah Antar Desa (MAD)** sebagai basis komunalitas (paguyuban) kawasan tersebut. Untuk itu perlu adanya perluasan keanggotaan/kepesertaan MAD yang meliputi seluruh komponen representasi pemangku kepentingan (*stakeholders*) agrowisata berbasis masyarakat. MAD perlu dijadikan sebagai forum pengambilan keputusan secara komunal/kolektif yang terlembaga melalui pertemuan rutin (paguyuban) setiap sebulan sekali atau *selapanan* (35 hari sekali). Pelembagaan integrasi dapat dilakukan melalui **inisiasi Badan Perencanaan Pembangunan Kawasan/Desa (Bappekas/Bappedes)**.

Integrasi eksternal/vertikal kawasan memerlukan wadah bagi komunikasi, koordinasi, kolaborasi, dan diskusi pengembangan dengan berbagai elemen pemangku kepentingan di luar kawasan. Untuk itu perlu **pembentukan Forum Kolaborasi Kawasan Agrowisata Menoreh Terpadu (FKKAMT)** yang terdiri dari unsur pemerintahan, perguruan tinggi, swasta, pendamping kawasan Kementerian Desa, dan perwakilan MAD di atas, yang dilembagakan melalui SK Bupati.

BUMDes Bersama perlu segera menyusun **Social Business Model Canvas dan Business Plan** sesuai dengan model-model integrasi antarlembaga dalam penelitian ini sebagai panduan peran bisnis sosial di tengah-tengah masyarakat kawasan. Dalam upaya aktivasi BUMDes Bersama harus melibatkan pemuda desa yang peduli, kreatif, dan memiliki semangat kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) yang tinggi.

BUMDes Bersama perlu membuat **cetak biru (blueprint) Menoreh 4.0**, yaitu strategi dan tahapan transformasi kawasan yang terintegrasi secara spasial berbasis platform digital. Sebagai salah satu elemen pentingnya adalah pembuatan *local marketplace* kawasan sebagai media integrasi *virtual* dan *e-marketing* ke berbagai segmen pelanggan.

REFERENSI

- Awang, San Afri, dkk. 2013. *Pengembangan Model Inkubator Ekonomi Kerakyatan di Desa-desa Miskin Sekitar Hutan: Studi Kasus di Kabupaten Gunung Kidul, DIY*. Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan, Universitas Gadjah Mada
- Ansell, Chris dan Alison Gash. 2007. "Collaborative Governance in Theory and Practice" dalam *Journal of Public Administration Research and Theory*, Oxford University Press, diunduh dari <https://academic.oup.com/jpart/article-abstract/18/4/543/1090370>, pada 05 Juli 2018
- Indroyono, Puthut, dkk. 2018. "Democratic Model for Village Economic Resource Management in Nglanggeran, Gunungkidul", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JSP)*, Volume 21 No 3
- Koning, Mirjam de, dkk. 2016. "Collaborative Governance Improves Management Effectiveness of Hin Nam No National Protected Area In Central Lao Pdr", *The International Journal of Protected Areas and Conservation Volume 22.2 November*, IUCN World Commission on Protected Areas (WCPA), diunduh dari http://parksjournal.com/wp-content/uploads/2016/11/PARKS-22.2-de-Koning-et-al-10.2305IUCN.CH_.2016.PARKS-22-2MdK.en_.pdf , 06 Juli 2018
- Suyatna, Hempry, dkk. 2017. *Model Kerakyatan Energi Terbarukan*. Yogyakarta: Gama Press,
- Suyatna, Hempry, dkk. 2018. "Model Inkubator Kewirausahaan Hijau: Studi Kasus di Desa Nglanggeran Kabupaten Gunungkidul" *Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol 17 No 1

- Tim Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM. 2008. *Laporan Akhir Studi Model Pengembangan Desa Koperasi Sebagai Inkubator Ekonomi Kerakyatan di Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY.*
- Tim Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM. 2009. *Laporan Akhir Penelitian Pengembangan Model Inkubator Ekonomi Kerakyatan Di Desa-Desa Miskin Sekitar Hutan: Studi Kasus Di Kabupaten Gunung Kidul Propinsi DIY.*
- Tim Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM. 2011. *Laporan Akhir Program Nilai-nilai Mandiri Energi dan Organisasi Komunitas Desa Mandiri Energi Tahun 2011.*
- Tim Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM. 2012. “*Menjaga Pilar Ekonomi Rakyat*”. Lembaga Ombudsman Swasta (LOS-DIY). Yogyakarta.
- Tim Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM. 2012. *Laporan Akhir Program Nilai-nilai Mandiri Energi dan Organisasi Komunitas Desa Mandiri Energi Tahun 2012.*
- Tim Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM. 2013. *Laporan Akhir Program Nilai-nilai Mandiri Energi dan Organisasi Komunitas Desa Mandiri Energi Tahun 2013.*
- Tim Sekolah Pasar Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM. 2013. *Sekolah Pasar: Dari Pasar Rakyat Merebut Kedaulatan.* Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM.

Website:

- <http://rpkp.org/kab-kulon-progo/>
- <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3606172/pemerintah-kucurkan-dana-desa-sejak-2015-apa-saja-hasilnya>
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/07/16/berkurang-633-ribu-penduduk-miskin-indonesia-catat-rekor-terendah-sejak-1998>; diunduh tanggal 1 November 2018, jam 13:10

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Temuan FGD Kulonprogo, 02-03 Agustus 2018

PSEK UGM-Kementrian Desa RI Collaborative Governance Kawasan Agrowisata Terpadu Bukit Menoreh, Kulonprogo

Pengantar

Kelompok-kelompok yang hadir terdiri dari pokdarwis, poktan, dan kelompok masyarakat lainnya. FGD ini merupakan kerja sama kajian antara UGM dan Kementerian Desa khususnya tentang integrasi pemerintahan di desa dan dalam kasus ini adalah integrasi pola pemerintahan Kawasan Agrowisata Menoreh di 6 desa di Kecamatan Samigaluh dan Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta. Integrasi yang dimaksud adalah antara birokrasi pemerintah pusat, daerah, kabupaten, kecamatan, dan kelompok masyarakat untuk memajukan kawasan.

Daerah di 2 kecamatan ini cukup maju dalam bidang pertanian terutama komoditas kakao, durian, dan sayur- mayur. Selain itu ada tujuan wisata yang mulai populer yaitu beberapa embung yang juga berfungsi untuk menyimpan cadangan air salah satunya adalah Embung Krapyak. Selain itu juga ada tujuan wisata lainnya yang sudah lama terkenal yaitu tujuan wisata religi di Sendangsono. Masih banyak potensi lainnya yang bisa dikembangkan maka diperlukan kerja sama

seluruh anggota masyarakat baik oleh birokrasi maupun kelompok masyarakat. Diharapkan setelah adanya kajian ini akan ada kelanjutan kegiatan dalam bentuk program-program pendampingan masyarakat yang nantinya tercapai integrasi pengelolaan kawasan khususnya wisata.

Beberapa hal yang perlu didapat dari FGD ini yaitu bagaimana model integrasi bisa terbentuk yang salah satunya untuk sementara adalah integrasi dalam bentuk BUMDes. Salah satu perekat integrasi kawasan yaitu musyawarah antardesa dan badan antardesa yang sudah ada di kawasan ini yang bisa menjadi model awal. Yang menjadi permasalahan adalah, apakah lembaga-lembaga tersebut sudah ada *roadmap* untuk membentuk kerja sama integrasi riil dalam kawasan? Lalu, apakah elemen-elemen masyarakat sudah menjadi poros utama dalam lembaga-lembaga kerja sama yang ada? Integrasi dalam kawasan harus memasukkan elemen masyarakat dalam posisi strategis dan riil. Optimalisasi aset wisata termasuk komoditasnya juga harus ada integrasi dalam bentuk satu alur yang saling menyambung. Hal penting lainnya adalah penggalian kearifan lokal yaitu tradisi-tradisi yang dapat menyatukan masyarakat dan pemerintah kawasan untuk mendorong model integrasi. Yang terakhir, peranan teknologi informasi yang dapat membuat jarak bukan halangan lagi dan integrasi dapat dilakukan dalam hitungan detik.

FGD Kalibawang, 02 Agustus 2018

Tanggapan dan Ulasan

Kasimun, KUD Sido Tentrem Kalibawang

Hampir tiap tahun selama 3 bulan, ada perbaikan jalan sehingga masa panen kesempatan banyak yang hilang maka jika integrasi harus bagaimana. Dalam hal kakao sudah 25 tahun ada di Kalibawang namun saat ini sudah mulai rusak dan proses pembaruan komoditas tanaman tidak merata di seluruh desa. Dalam hal koperasi yang diharapkan akan menjadi soko guru namun hingga saat ini tidak ada proses

fasilitasi apa pun. Hingga saat ini yang paling banyak diuntungkan adalah pihak swasta. Permintaan KUD untuk menyalurkan pupuk dengan koperasi usaha bersama dalam KUD namun terganjal pada pajak yaitu 1% dari omzet. Hal itu terlalu berat untuk koperasi. Ditambah lagi dengan sirkulasi dana anggota yang kebanyakan adalah petani tidak mampu mengejar besaran modal yang diperlukan untuk menutupi masalah operasional dan pajak.

Semenjak letusan Gunung Kelud dan abunya yang seperti kaca sampai ke daerah ini juga menghancurkan banyak komoditas tanaman yang membuat kualitas panen tidak sebagus dulu. Misalnya komoditas buah yang dulunya manis sekarang berubah drastis menjadi tidak terlalu manis sehingga harga jual juga jatuh dan selama bertahun-tahun kondisi tidak membaik. Selain itu masalah pengairan dan Sungai Progo juga banyak mengalami kendala. Seperti hari ini sudah 2 hari air tidak mengalir ke masyarakat. Jika nantinya akan ada integrasi kawasan, integrasi seperti apa yang akan dapat membantu untuk mengurai masalah-masalah seperti ini.

Winarno, Pemerintah Desa Banjarasri

UMKM di desa sudah bermunculan semakin banyak namun belum ada penyatuan dengan wisata agro dan wisata religi, dan wisata kuliner supaya semua dapat maju. Wisata budaya juga banyak yang bisa ditawarkan. Akan tetapi belum ada standarisasi yang disepakati bersama sehingga penyatuan masih belum bisa dilakukan. Selain itu jika ada permasalahan soal modal belum ada tempat yang bisa jadi tumpuan. Sayangnya nilai-nilai budaya dan agama yang tadinya dipegang teguh oleh masyarakat juga semakin luntur.

Sandriyono, Balai Penyuluhan Pertanian

Embung Kapyak dibangun oleh pemerintah dan kawasannya dibangun oleh BPP dengan berbagai tanaman buah seperti lengkeng dan lainnya dengan biaya hampir Rp1 miliar. Yang paling cepat berbuah adalah tanaman cabai. BPP dapat membantu untuk memberdayakan

petani. Dulu ada tamu dari Jepang yang mengaku mengagumi perbukitan Menoreh, sayangnya aksesnya penuh dengan risiko sehingga membuat orang enggan datang. Sarannya adalah kereta gantung untuk menghubungkan kawasan dan bagus untuk wisata.

Supardi, Gabungan Kelompok Tani Kalibawang

Tiap tahun ada proses pengeringan untuk penelusuran jaringan dan kerusakan dan setiap 5 tahun ada pengeringan besar selama 1/3 bulan untuk proyek *multiyears*. Terdapat jaringan sistem pengairan Kalibawang yang salah satunya berasal dari Waduk Sermo. Irigasi diatur oleh peraturan bupati yang salah satunya untuk pertanian khususnya untuk penanganan hama. Sayangnya tidak diikuti dengan pengelolaan pascapanen sehingga sebegus apa pun sistem irigasi, pertanian terutama agrowisata akan sulit untuk maju. Petani Kalibawang dan umumnya Kulonprogo, kebanyakan adalah petani gurem, sangat jarang petani mempunyai lahan sampai 1 hektar sehingga kebanyakan hasilnya hanya cukup untuk makan petani. Selain itu petani sulit untuk sejahtera karena setiap panen ada operasi pasar sehingga petani tidak dapat menentukan harga. Disarankan juga petani didorong tidak hanya menjadi petani padi namun buah dan sayuran yang harganya lebih tinggi.

BKAD Kalibawang

Macetnya selokan setiap tahun dalam pengelolaan debit air memang tujuannya sangat baik. Namun di tingkat lapangan penyerapan air sangat penting terutama setelah era semenisasi. Akhirnya banyak sumur masyarakat yang kering karena aliran air sangat terganggu. Setelah semenisasi juga muncul hambatan lain misalnya jika ada orang yang terpeleset di selokan tidak ada tempat yang pegangan seperti dulu bisa mengandalkan tanaman tanah. Embung Tonogoro dibangun oleh dinas pertanian dan disusul oleh dinas pariwisata sehingga pengelolaannya tidak ada titik temu. Namun ada hal lain ketika dinas-dinas bisa cukup terintegrasi dalam hal komoditas tani

khususnya kakao. Oleh karena itu ada program yang sejak awal sudah terpadu baik kawasan, birokrasi, dan rakyat. Dalam hal pengembangan ekonomi kawasan ada pengembangan inkubator ekonomi lokal dan/atau pengembangan inkubator produk desa BUMADes baru setingkat kecamatan dan masalah wisata itu pun masih dalam tahap observasi oleh BKAD. Diperlukan pemetaan aset di 6 desa di kawasan ini termasuk juga pemetaan budaya karena karakter dan potensi masing-masing desa baik komoditas dan budaya berbeda-beda. Diperlukan juga adanya pembentukan BKAD tingkat kawasan karena yang ada saat ini hanya tingkat kecamatan.

Jono, Pokdarwis Banjararum

Masih organisasi baru dan sama sekali belum terintegrasi dan masih belum ada bayangan alur kerja sama dalam jaringan. Karena berbasis masyarakat maka kekompakan memang masalah utama maka hampir mustahil untuk terlibat dalam integrasi. Oleh karena itu perlu adanya jaminan bahwa masyarakat akan tetap memiliki tumpuan jika menemui hambatan.

Sigit Harmanto, Pokdarwis Depok Asri

Diharapkan adanya integrasi bermacam wisata ke depannya akan membuat pengembangan ekonomi yang lebih cepat. Sayangnya infrastruktur untuk mengakses wisata-wisatanya malah cukup membahayakan. Misalnya untuk masuk ke Samigaluh dan Sendangsono tidak bisa menggunakan bus wisata yang besar. Jika infrastruktur bisa diatasi, maka volume wisata pasti akan meningkat. Pemetaan potensi juga diperlukan karena potensi-potensi komoditas yang terkenal sebenarnya tidak tersebar. Masing-masing desa memiliki dominasi potensinya sendiri. Salah satu yang perlu dikembangkan juga adalah kuliner karena tamu yang jauh-jauh datang ke kawasan ini tentu memerlukan konsumsi kuliner. Sayangnya kuliner masih jauh dari berkembang.

Marjono, Kube Sejahtera

Kelompok ternak kambing yang dipelihara di rumah masing-masing karena belum adanya area yang bisa digunakan untuk ternak bersama. Hingga saat ini masalah yang paling besar adalah para peternak belum bisa mengatasi tingkat kelahiran hidup yang rendah. Selain itu setelah adanya isu antrax harga jual jatuh dan hingga saat ini belum menemui solusi tentang isu ini.

Suhartono, Gapoktan Sri Lestari Banjarasri

Kendala yang dihadapi yaitu standarisasi harga dari pemerintah yang tidak sesuai dengan harga yang ditawarkan petani. Untuk menekan harga para petani kesulitan untuk mencari bahan baku.

Triyono, Pemerintah Desa Sidoharjo

Kawasan ini potensi utamanya adalah wisata dan pertanian namun demikian masyarakat desa di sini belum dapat berbuat sesuatu. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya di perangkat desa. Oleh karena itu, diperlukan pendamping dari luar desa yang bisa aktif “masuk” ke masyarakat untuk melihat dan menyusun konsep-konsep pengembangan. Hal ini tidak dapat dilakukan oleh orang dalam desa karena sudah “terlalu nyaman” sehingga akan susah menemukan pandangan objektif tentang potensi dan kelemahan yang ada. Selain itu diperlukan perubahan pola pikir. Hambatan lainnya adalah tidak ada kemampuan untuk menerjemahkan ide dalam sebuah konsep yang detial dan inilah peranan pendamping. Potensi di kecamatan ini juga kaya akan nilai budaya baik dari sisi seni dan kuliner namun belum ada wadah untuk optimalisasi.

Hartono, Dolan Desa

Wisata merupakan tumpuan utama wilayah ini karena wisata adalah jalan tercepat untuk memajukan wilayah. Agrowisata seperti menghadapi dilema, petani menanam untuk mendapat untung, namun ketika panen harga justru turun. Berbeda dengan pola produksi untuk dimakan sendiri, produk-produk dalam agrowisata hasil tani

akan diperlakukan seperti oleh-oleh. Wisata akan bergerak jika banyak yang datang. Karena wisata adalah bisnis maka semua harus berkesinambungan bukan seremonial yang hanya dilakukan sekali-kali saja. Yang harus dikejar adalah menemukan cara untuk memutar uang.

Yang dibutuhkan warga dan produk pedesaan bagaimana mengemas, promosi, dan memasarkan. Jika hanya fokus pada pelatihan, maka itu hanya akan dalam rangka sekedar menjalankan program pemerintah. Diperlukan praktisi yang berperan sebagai pendamping untuk membantu mengemas, promosi, dan pemasaran. Hal yang diperlukan lainnya adalah kreativitas karena hampir seluruh potensi yang ada di kawasan ini sebenarnya sudah ada di kota Yogyakarta. Misalnya dalam agrowisata yang dikembangkan di Dolan Desa ada kreativitas yang ditawarkan dalam wisata, yakni program “baca padi” yaitu memberikan narasi kepada tamu sekaligus mereka bisa bereksplorasi tentang pengetahuan baru tentang padi.

Jika ingin membuat integrasi maka harus dihidupkan titik-titik wisata yang sudah ada dan model bisnis yang bagus karena bagaimanapun wisata harus berbasis pada keuntungan.

Jika berbicara BUMDES baiknya ada pembelian produk dari masyarakat, diberi label, dan dijual. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan UMKM oleh BUMDES dan dijual di berbagai titik wisata. Jangan dijual di *supermarket* karena susah bersaing. Oleh karena itu diperlukan model pengelolaan usaha yang baik, baru berbicara soal integrasi.

Hendri Usdiaka, Camat Kalibawang

Sudah pernah ada usaha fasilitasi dan keputusan-keputusan tertentu yang sampai ke pusat. Sudah ada beberapa langkah yaitu PerGub yang menunjuk ke kawasan ini, pendirian musyawarah antar-desa untuk 6 desa, BKAD 6 desa, BUMDes yang mengelola agrowisata dengan komoditas utama durian dan kakao yang disusul kopi. Selain itu ada kawasan-kawasan wisata. Rencana dana desa untuk pembentukan rumah pajang/*showroom*. Usulan-usulan yang sudah disusun di dinas namun belum ada satu pun yang ada *progress*-nya. Proyek-

proyek dari dinas juga terlalu banyak terutama terkait kepariwisataan membuat bingung terutama kebingungan di tingkat masyarakat.

Terkait “Bedah Menoreh”, pemetaan yang baru membuat wilayah Kalibawang seperti ditinggal dan dari pemetaan yang ada, orang akan enggan melewati daerah Kalibawang. Yang diperlukan juga ada pelebaran jalan di titik-titik wisata termasuk wisata paling terkenal yaitu Sendangsono karena selama ini akses jalannya terkenal susah dilalui sehingga membuat orang enggan untuk datang. *Homestay* sebenarnya sudah banyak di kecamatan ini namun tidak laku.

Wakil dari Desa Banjararum

Perlu orang luar yang melihat potensi yang perlu dikembangkan karena birokrasi daerah tidak mampu melakukan itu karena sudah habis energinya untuk masalah birokrasi.

Bu Ning Kelompok Wanita Tani

Jatuh bangun di usaha gabah dan sedang berusaha pindah ke usaha beras yang dipasarkan ke sesama anggota. Selain itu juga kesulitan pemasaran produk usaha seperti *slondok* dan *ceriping*. Selama ini baru dititipkan ke pasar tradisional. Diharapkan ada dikelola secara bersama oleh BUMDes. Diharapkan juga ada pelatihan menghasilkan produk selain produk pangan misalnya hasil-hasil kerajinan untuk dijual di tempat wisata.

FGD Samigaluh, 03 Agustus 2018

Tanggapan dan Ulasan

Triyanto, Camat Samigaluh

Diharapkan adanya publikasi yang lebih gencar tentang Samigaluh terutama terkait perbukitan Menoreh yang dipadukan dengan semua potensi wisata yang ada. Dari segi komoditas, yang bisa dijual adalah kopi karena sudah paling terkenal lebih dahulu. Hanya saja belum ada *branding* yang disepakati antara Kopi Menoreh atau Kopi Suroloyo.

Dan lebih baik dikembangkan juga berbagai fasilitas wisata lainnya yang bisa membuat wisatawan akan kembali ke Kulonprogo, misalnya penginapan atau sarana hiburan lainnya yang mengandung budaya dan edukasi.

Damar, Kepala Desa Gerbosari

Pada tahun 2016, Samigaluh dan Kalibawang sudah disepakati merupakan Kawasan Agrowisata Menoreh Terpadu. Ada klasifikasi khusus atau komoditas unggulan yang disepakati yaitu durian dan kakao. Di masing-masing desa juga ada klasifikasi khusus untuk mendukung wisata Borobudur yaitu kopi, manggis, dan bunga krisan. Selain peningkatan pertanian juga optimalisasi produk unggulan lainnya, ada juga program Desa Sejahtera Mandiri dan Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Desa yaitu rumah pajang/gerai dan ada lembaga BUMADes. Agar semuanya sinkron dengan hasil bumi dan pelestarian adat istiadat, harus ada semacam sentra produksi dan pemasaran produk desa. Selain itu perlu diperluas juga jenis produk yang ditawarkan, misalnya wisata edukasi dalam bentuk *leave in again* ikut membuat barang-barang khas wisata. Yang paling penting juga adalah pengembangan kualitas SDM. Produksi alam yang belum dieksplorasi juga masih banyak, salah satunya adalah cengkih. Dari segi partisipasi masyarakat juga dirasakan sudah semakin meningkat.

Budiharjo, BPD Desa Sidoharjo

Perlu adanya kegiatan yang dianggarkan dan dijual, misalnya lewat kerajinan yang unik yang berasal dari kayu yang banyak diproduksi di Samigaluh. Selain itu juga banyak tanaman seperti buah-buahan yang cukup langka. Khususnya saat ini mulai digalakkan penanaman buah durian. Samigaluh juga memiliki beberapa kuliner khas yang dapat menarik wisatawan.

BKAD Samigaluh

Untuk tahun ini BKAD diposisikan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Yang sudah dilakukan adalah pembelian bibit durian dan manggis dan juga alpukat untuk peningkatan wisata lewat ikon buah. Potensi lainnya juga adalah limbah tanaman sampah khususnya sampah daun kering yang per kilogram mencapai Rp4.000,- yang biasanya dimanfaatkan untuk produksi minyak atsiri yang dapat berguna untuk obat-obatan, salah satunya remason. Jika hal ini dilanjutkan maka bisa dijadikan ikon lainnya untuk Samigaluh. Yang harus dilakukan adalah bantuan pemasaran karena kemampuan produksi sudah ada yang nantinya bisa menjadi embrio industrialisasi desa.

Peternak Kambing

Supaya kawasan ini bisa segera berkembang dan dikenal masyarakat luas, lebih baik ada pihak lain dari luar yang membuat rumah pajang yang difokuskan untuk produk *home industry*. Kreativitas aneka hasil produksi sangat luas, namun selalu terhenti perkembangannya karena pemasaran yang sangat sempit, yaitu konsumen baru dari lokal karena belum bisa dikenal secara luas. Lebih baik lagi jika rumah pajang berada di luar wilayah kawasan, misalnya di Kota Yogyakarta. Yang dibutuhkan juga adalah SDM. Hidup di pedesaan sangat minim pengetahuan. Berbagai macam pelatihan tidak pernah berkesinambungan. Misalnya setelah pelatihan selesai dan masyarakat bisa mengerjakan, akhirnya tetap saja hasilnya tidak bisa dimanfaatkan di luar desa atau luar wilayah sehingga hasil pelatihan sering kembali hilang.

Marwiyah, Kelompok Wanita Tani

Perlu paket atau rute yang menghubungkan desa-desa dan pelaku wisata yang sudah berjalan. Yang nantinya akan dilewati di rute tersebut akan berimbas dari kegiatan wisata yang ada. Pelatihan SDM juga untuk meningkatkan keterampilan dan *service/attitude, e-commerce*.

Masyarakat juga harus dilibatkan dalam pengelolaan paket/rute. Rumah pajang juga bisa diinisiasi dengan sistem titip dengan pengelola atau produsen yang sudah ada. Jadi ada produsen atau tempat yang sudah biasa didatangi wisatawan untuk dititipkan menjadi rumah pajang sementara dengan dititipkan barang-barang dari *home industry*.

Ada wisata edukasi berupa KWT yang sudah beberapa kali kunjungan studi banding. Mungkin ini bisa menjadi salah satu andalan untuk Menoreh. Perlu pelatihan juga untuk para pelaku usaha supaya mereka sudah siap untuk menerima kunjungan wisatawan jika nanti agrowisata sudah benar-benar siap. SDM perlu penekanan, terutama untuk penanaman durian dan benar-benar diseriuskan supaya wisatawan yang datang tahu tujuannya datang ke kawasan untuk apa. Ada juga acara rutin setiap 1 Suro di Nglambur (di bawah Suroloyo) yaitu kirab budaya yang bisa ditawarkan dan disinergikan dengan KWT. Dengan kata lain, wilayah ini bisa dipusatkan sebagai wisata budaya.

Suparno, Kasi Ekonomi Kecamatan Samigaluh

Samigaluh pernah diberi mesin pengolahan ponpon senilai Rp60 juta, namun selama ini mangkrak dan bahkan belum pernah digunakan karena tidak bisa menyeimbangkan biaya produksi (dan perawatan). Perlu skema yang dapat menutupi ketidakseimbangan biaya ini.

Tanti, Konsultan Organizer Yogyakarta

Perlu ada pemetaan dari dinas pariwisata dan asosiasi *travel agent*. Koordinasi antarlembaga dan pelaku perlu dipegang oleh dinas pariwisata.

Suparbe, Gapoktan Manunggal Gerbosari

Ada 44 kelompok tani, berkebun, dan ternak. Sudah mencoba wisata edukasi yang menggabungkan tani, ternak kambing, dan KWT. Mencoba mengedukasi cara beternak dan bertani (termasuk holtikultura) ke wisatawan. Yang nantinya juga bisa dijual adalah sungai dan

selokan untuk susur sungai. Sejauh ini sudah ada 17 orang wisatawan yang mau datang. Tinggal bagaimana melipatgandakan jumlah dan menjaga reputasi.

Alif Budiyanto, pengelola Homestay Banyumili

Sudah dilakukan pembenihan dan panen. Sekitar 3 tahun lalu mengembangkan *homestay* yang jadi satu dengan rumah. Tamu biasanya dari Jakarta yang setahun datang 2 kali. Butuh bantuan untuk memajukan usaha *homestay* terutama pendampingan teknis pengembangan usahanya.

Marjo, Pokdarwis Suroloyo

Untuk rumah pajang, di Suroloyo ada pengunjung tiap tahun tapi souvenir didatangkan dari Borobudur. Maka akan bagus jika ada rumah pajang di Suroloyo untuk souvenir para wisatawan. Penjualnya juga banyak yang berasal dari Jawa Tengah, padahal produk dari Samigaluh sudah banyak tapi tidak ada yang terkenal. Sejauh ini yang paling terkenal baru Kopi Suroloyo.

Joko Maryanto, Pendamping PKP

Semua potensi yang banyak di Samigaluh tidak ada berjalan baik jika tidak ada kolaborasi. Harus ada skema kolaborasi semua pelaku. Tujuan utamanya adalah penjagaan sirkulasi modal dari hulu dan hilir. Namun jika semua tanpa dukungan dinas, maka tidak akan ada yang berjalan, maka yang paling penting adalah bagaimana pengembangan pola dan skema integrasi dinas-dinas yang ada.

Sudah terlihat embrio ekonomi produktif karena seluruh elemen usaha rakyat sudah ada kolaborasi. Kemendes lebih baik bisa merangkul semua dinas yang sudah berkolaborasi.

FGD 3 (Terpadu), “Dolan Ndeso”, 16/8/2018

Pengantar

Dalam rangka mempercepat pengembangan kawasan Agrowisata Menoreh Terpadu, ada beberapa kondisi yang dapat ditangkap melalui FGD I dan II, yang secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut:

Setelah menginjak tahun kedua dicanangkannya sebagai kawasan, pola integrasi dan kolaborasi belum menunjukkan perkembangan sesuai harapan. Para pelaku masih terkesan “berjalan sendiri-sendiri” dalam menghadapi permasalahan menyangkut kawasan agrowisata terpadu.

Perlu pemetaan pola integrasi/kolaborasi dari para pelaku dalam setiap tahapan proses agrowisata terpadu, mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi, agar upaya integrasi dan kolaborasi dapat dikembangkan secara komprehensif dan sistematis. Kekuatan pengintegrasian dalam hal ini secara teoretis dan melalui kebijakan pemerintah pusat dan daerah (antara lain dengan dibentuknya BUMDes Bersama) perlu dipetakan lebih jauh fungsi-fungsinya agar menjadi penguat integrasi kawasan. Kekuatan pengintegrasian dalam kasus BUMDes baru menjawab sebagian masalah kelembagaan sosial ekonomi; ada masalah lain yang belum terjawab misalnya masalah pengintegrasian spasial (peta wisata) dan pengintegrasian budaya/kultural.

Berdasarkan hasil-hasil FGD ke-3, permasalahan integrasi/kolaborasi dapat dikategorikan sekurang-kurangnya dalam 2 aspek, yakni:

Aspek tata kelola kelembagaan

Belum adanya wadah/media/organisasi yang secara sistematis melakukan upaya pengintegrasian potensi, baik pada aras (*level*) birokrasi pemerintahan secara vertikal/horizontal, termasuk integrasi/kolaborasinya dengan dunia usaha dan ekonomi rakyat.

Meskipun demikian, sudah ada inisiatif baru-baru ini oleh BKAD (Badan Kerjasama Antar-Desa) menyangkut penyiapan kelembagaan yang diharapkan dapat menjadi wadah/instrumen yang mampu men-

dorong upaya kolaborasi berbagai potensi kelembagaan dan potensi sumber daya, yakni berbentuk BUMDes Bersama. Dibutuhkan harmonisasi kelembagaan pada aras Pemkab dan Pemdes. Misalnya pada level perencanaan daerah, perlu ada *review* dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan yang telah ada. Sekalipun RPKP yang dibuat tahun 2016 telah menyebutkan rencana sampai dengan 5 tahun ke depan, perlu di-*review* kembali untuk mendapatkan gambaran terkini terkait kondisi dan perkembangan yang ada di kawasan.

Ada kebutuhan untuk: 1) me-*review* dokumen RPKP, dalam upaya untuk melakukan integrasi dalam perencanaan, rencana implementasi, dan evaluasi/monitoring. 2) Melakukan analisis "*content*" dalam perencanaan yang telah ada termasuk *roadmap*, agar sesuai dengan kondisi saat ini dan dapat lebih aplikatif. Misalnya dalam menetapkan produk unggulan desa.

Aspek pemberdayaan ekonomi rakyat

Inisiatif pembentukan wadah BUMDes Bersama yang telah terbentuk belum mampu memberikan arah yang sistematis terkait pengintegrasian kerja sama kelembagaan dan potensi yang ada dalam kawasan. Kesan lembaga yang dibentuk untuk "menangkap" dari sisi legal formal program dari pusat (dhi. Kemendes) berupa rumah pajang. Sebagai langkah awal, inisiatif itu perlu ditindaklanjuti dengan melakukan inventarisasi "wilayah" bidang usaha BUMDes Bersama, agar berfungsi sebagai sarana pengintegrasian berbagai potensi, dan bukan menjadi pesaing bagi usaha-usaha yang telah ada. Salah satu contoh bentuk bidang usaha adalah pemasaran bersama produk pangan lokal. Rumah pajang dapat menjadi embrio bisnis usaha yang dikelola secara lebih profesional berdasarkan target-target bisnis tertentu. Ia juga tidak perlu memasuki wilayah produksi, sekalipun memiliki misi untuk mendorong agar potensi produk lokal meningkat dari sisi kualitas dan kuantitasnya sesuai permintaan pasar. Pola ini harus disepakati di awal secara transparan, diketahui oleh berbagai kelompok-kelompok masyarakat, dan menjadi dasar bagi "*rule of the game*" ke depan.

Sebagai contoh “miniatur” bidang usaha yang dikelola Dolan Ndeso dengan melibatkan 6 mitra kelompok masyarakat, yang berfungsi menjadi pilar/pemasok produk lokal/desa, dapat menjadi rujukan. Masing-masing mitra mempunyai catatan tentang bisnis yang dikerjasamakan dalam Dolan Ndeso, mulai dari kelompok kuliner, kelompok pertanian, dan lain-lain. Keluar ia berfungsi sebagai wadah yang mengkoordinasikan dan memfasilitasi kebutuhan pasar/pelanggan, membaca pasar, sedangkan produksinya diserahkan kepada kelompok-kelompok masyarakat berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan Dolan Ndeso (memunculkan kebutuhan pengembangan kapasitas SDM). Sebagai gambaran saat ini Dolan Ndeso memiliki omset Rp200 juta, dan memberi masukan kepada pemerintah melalui pajak sebesar Rp3 juta/bulan. Miniatur ini dapat dijadikan pola kerja sama usaha yang ada di kawasan.

Info dari Pak Camat, sebagai contoh model integrasi, Dolan Ndeso bahkan menjadi mitra BRI dalam penyaluran kredit.

Ada pembangunan bandara dan siap beroperasinya pelabuhan. Kemungkinan besar akan membuat kawasan Kulonprogo semakin ramai. Hal ini yang seharusnya dijadikan potensi untuk kemajuan ekonomi dan kemandirian masyarakat. Kalibawang serta Samigaluh akan menjadi daerah penyangga wisata Menoreh dan Borobudur.

Hasil BKAD: membentuk BUMDesA yang salah satu fungsinya adalah menampung bantuan dari Kementerian Desa.

RPKP: hasil dari aspirasi masing-masing wilayah di kawasan ini, namun belum ada payung hukum. Isi RPKP dan payung hukumnya harus segera diselesaikan agar bisa integrasi seluruh wilayah Kawasan Agrowisata Menoreh Terpadu (dinas pemberdayaan). Dalam RPKP ada berbagai unit yang salah satunya adalah unit usaha yang menampung produk unggulan desa. Namun masih dibutuhkan skema kolaborasi supaya RPKP yang ditujukan untuk terpadunya wilayah bisa segera terlihat kemajuannya. Karena belum ada payung hukum dan fiksasi RPKP mungkin yang menyebabkan kolaborasi selama ini tidak pernah bisa dilakukan.

Para pengurus yang ada di BKAD sebagian besar adalah dari kecamatan/kepala desa, dan kurang melibatkan *stakeholder* yang lain, terutama dari kelembagaan di masyarakat. Diperlukan perluasan cakupan keanggotaan BKAD sehingga secara inklusif mampu menjadi wadah bagi upaya kolaborasi dan integrasi berbagai potensi kelembagaan sosial ekonomi yang ada dalam masyarakat. Sementara itu dari sisi pemerintahan, diperlukan pembaruan SK untuk pelaksanaan RPKP. Supaya ada jalannya kolaborasi.

Ichsanuddin, Ketua BUMDesA

Sudah terbentuk dan sudah ada susunan pengurus serta orang-orang untuk mengisi posisi-posisi tersebut. Selama ini BUMDesA baru bisa berkomunikasi dengan pendamping desa yang meminta usulan strategi pelaksanaan kolaborasi. Namun ada kebutuhan untuk dihadirkan berbagai macam ahli, terutama dalam bidang pengembangan ekonomi kawasan dan BUMDesA. Lokasi rumah pajang: rencananya di Desa Banjar Arum. Kegiatan riil belum ada kecuali pembuatan proposal. Sesama pengurus BKAD/BUMDesA bahkan belum pernah melakukan pertemuan. Paling pokok yang harus dilakukan adalah bantuan dana pokok karena dana dari Kemendes PDTT tidak dapat digunakan untuk urusan operasional.

Sugihartono, Pengelola Dolan Desa

Dolan Ndeso saat ini hanya dikelola 4 orang. Dimulai sejak tahun 2016 dengan berbagai mitra seperti kuliner, pemuda, kesenian, dll. Ini bentuk kolaborasi mini antara Samigaluh dan Kalibawang. Tidak menjual tiket tapi kegiatan terpadu. Memiliki mitra dari desa-desa di Kalibawang. Dolan Ndeso sudah bisa merangkul dari berbagai pihak. Sudah ada sekitar 35 rumah di sekitar Dolan Ndeso yang bisa digunakan untuk menginap. Meskipun pada awalnya sulit untuk mengajak warga. Kelemahan produksi dari desa adalah pengemasan, promosi, dan pemasaran. Selama ini, 3 problem itu belum mampu dicari solusinya.

Solusi yang dilakukan oleh Dolan Ndeso adalah menjadikan produk desa sebagai oleh-oleh wisata. Keuntungannya adalah 1) harga menjadi lebih tinggi; 2) dapat menggunakan objek wisata sebagai *outlet* dari produk di desa.

BUMDes bisa mengambil peran dalam pengelolaan potensi desa khususnya wisata dan menjadi lembaga bisnis bukan lembaga sosial.

Telah ada BKAD dan BUMDESMA. Nah setelah itu perlu ada langkah teknis lanjutan. BKAD dan BUMDESMA dibentuk karena “paksaan” untuk menerima kucuran dana dari Kemendes PDTT sebesar Rp350 juta. Kepengurusan dalam organisasi BKAD dan BUMDESMA bersifat sementara karena ada faktor ketergesaan tersebut.

Bentuk yang paling ideal untuk pengembangan kawasan adalah model wisata berbasis masyarakat.

DIY sedang membuat rapergub tentang desa wisata. Desa wisata dapat dikelola oleh BUMDes

Desa wisata harus dibedakan dengan wisata di desa. Desa wisata, pengunjung melakukan interaksi yang intensif dengan masyarakat.

Potensi di desa ada sangat banyak tapi permasalahannya adalah SDM. Ada yang mampu tapi tidak mau dan sebaliknya. Oleh karena itu ada upaya sertifikasi untuk para pelaku yang terlibat dalam agro-wisata. Hal itu supaya kegiatan pengembangan kemampuan ada hasilnya. Ada juga permasalahan dari personal yang harusnya ditangani profesional, misalnya perbedaan pandangan pilihan pemimpin politik. Upaya lain yang harus dilakukan juga adalah kesadaran dari masyarakat di sekitar tempat wisata misalnya dengan *success story* pengalaman individu yang bisa berhasil karena tinggal di daerah penopang pariwisata.

Dinas PMD

Sedang menguatkan BUMDes. Konten perencanaan kolaborasi kawasan, harus segera dibentuk kebutuhan dan skema aplikatif. (*Same old same old*).

Joko Maryanto, Pendamping Desa

Antara perencanaan dan pelaksanaan di kawasan terpadu ini tidak tersambung. Dalam hal sinergitas sudah ada di RPKP dan dituangkan dalam RPJMD. Harus ada *review* RPKP. Semua kecamatan sudah mempunyai dokumen untuk di-*review*. Bisa juga BUMDesA melakukan kegiatan yang sudah ada, terutama produk unggulan kawasan seperti kakao dan pegagan yang disusul dengan kopi. Dengan ditemukannya banyak produk baru, maka akan lebih baik kesempatan adanya *review* digunakan untuk memasukkan potensi tambahan tersebut ke produk unggulan. Seperti tempat-tempat wisata tambahan lainnya yang ketika RPKP pertama belum ada. Semua perencanaan dan keinginan tersebut sudah sering terlontar, tapi *roadmap action* belum ada. Dari perencanaan tidak perlu dimulai dari awal karena sudah ada RPKP yang tinggal di-*review*. BUMDesA bisa mengurus soal kemitraan untuk tempat-tempat wisata baru yang memerlukan kepengurusan mitra.

Dinas Kominfo

Merupakan unsur penunjang namun tetap memiliki peran strategis karena berkaitan kebutuhan teknologi informasi dan pelayanan data (termasuk masalah persediaan menara) karena area *blank spot* saat ini sudah tidak bisa dinyatakan sebagai kawasan wisata. Di Jatimulyo (air terjual sebagai atraksi utama) ada kelompok wisata yang memajukan wilayah dengan media sosial untuk keperluan pemasaran. Dinas ini juga mengurus publikasi dengan kemitraan berbagai bentuk media massa cetak dan televisi dalam rangka pemasaran. Kerja sama dengan dinas pariwisata sudah terjalin namun belum terlalu berkembang. Saat ini juga sedang mengembangkan sistem *smart city* yang menghubungkan antardesa dengan kabel optik. Dampaknya segala bentuk pelayanan masyarakat akan dalam bentuk *online* untuk mendekatkan jarak. Selain itu juga ada program SID (Sistem Informasi Desa) dengan teknologi fiber optik karena teknologi sebelumnya tidak bisa lagi menampung kebutuhan data.

Triyanto, Camat Samigaluh

Kita perlu langkah teknis karena sudah telanjur mendapat bantuan sebanyak Rp150 juta di tahap pertama. Untung tahap ke-2 harus ada perencanaan penggunaan dana, maka BKAD harus segera bertemu.

Dinas Pertanian dan Pangan

Pertanian masih menjadi pekerjaan utama terutama pertanian komoditas unggulan.

Ada rencana memasarkan produk hasil unggulan dari masyarakat namun dengan label dari BUMDesA (atau BUMDesMa).

Kajian ini diselenggarakan atas kerja sama antara Direktorat Pengembangan Kawasan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta untuk mendorong terciptanya integrasi dan kolaborasi antarlembaga di Kawasan Prioritas Pembangunan Nasional (KPPN), khususnya di Kawasan Perdesaan Agrowisata Menoreh Terpadu. Kajian dilakukan dengan melibatkan segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait di Kecamatan Samigaluh dan Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo melalui serangkaian *indepth-interview*, FGD, dan *workshop*.

